



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (dua) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan, yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Renstra PD merupakan penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029.

### Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk :

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

### Pasal 4

Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- c. bab III : tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan
- d. bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. bab VIII : penutup.

### Pasal 5

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD dr. Soeselo;
- d. RSUD Suradadi;
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;

- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - u. Dinas Perikanan;
  - v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
  - w. Sekretariat Daerah;
  - x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - aa. Badan Pendapatan Daerah;
  - bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - cc. Inspektorat;
  - dd. Kecamatan Adiwerna;
  - ee. Kecamatan Balapulang;
  - ff. Kecamatan Bojong;
  - gg. Kecamatan Bumijawa;
  - hh. Kecamatan Dukuhturi;
  - ii. Kecamatan Dukuhwaru;
  - jj. Kecamatan Jatinegara;
  - kk. Kecamatan Kedungbanteng;
  - ll. Kecamatan Kramat;
  - mm. Kecamatan Lebaksiu;
  - nn. Kecamatan Margasari;
  - oo. Kecamatan Pagerbarang;
  - pp. Kecamatan Pangkah;
  - qq. Kecamatan Slawi;
  - rr. Kecamatan Suradadi;
  - ss. Kecamatan Tarub;
  - tt. Kecamatan Talang;
  - uu. Kecamatan Warureja; dan
  - vv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029.

## Pasal 6

- (1) Renstra PD dapat dilakukan perubahan apabila :
- a. terjadi perubahan RPJMD;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
  - c. perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Slawi

pada tanggal 19 September 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 46



**#BerAKHLAK** > **#bangga**  
**melayani**  
**bangsa**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# RENSTRA 2025-2029

KECAMATAN  
PAGERBARANG



kode pos 52462

<https://pagerbarang.tegalkab.go.id>

Jl. Raya Timur No.1 Pagerbarang



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025–2029 dapat tersusun dengan baik. Renstra ini merupakan pedoman penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Pagerbarang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang dirumuskan berdasarkan potensi, permasalahan, serta kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan. Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak lepas dari dukungan, kerjasama, dan masukan dari berbagai pihak, baik perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan, maupun tokoh masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Akhirnya, semoga Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi pemerintahan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang lebih maju dan berdaya saing.

Pagerbarang, 16 September 2025

Camat Pagerbarang



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAGERBARANG .....	7
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Pagerbarang .....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Pagerbarang.....	7
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Pagerbarang .....	8
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagerbarang.....	5
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pagerbarang.....	20
2.1.5 Mitra Kecamatan Pagerbarang Dalam Pemberian Layanan.....	21
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pagerbarang .....	22
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang .....	22
2.2.2 Isu-Isu Strategis .....	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	28
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	28
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pagerbarang .....	31
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	34
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	34
4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pagerbarang .....	45
BAB V PENUTUP.....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Kecamatan Pagerbarang.....	1
Tabel 2.2 Kebutuhan Pegawai kecamatan Pagerbarang .....	1
Tabel 2.3 Daftar Aset TanahTabel 2.3 Daftar Aset Tanah .....	2
Tabel 2.4 Daftar Aset Peralatan dan Mesin.....	3
Tabel 2.5 Daftar Aset Gedung dan Bangunan .....	4
Tabel 2.6 Jalan Irigasi dan Jaringan.....	4
Tabel 2.7 Daftar Aset Tetap Lainnya.....	5
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2020.....	6
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2021 .....	7
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024.....	10
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbaarang Kabupaten Tegal Tahun 2020.....	15
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbaarang Kabupaten Tegal Tahun 2021-2024 (Dalam Ribuan) .....	16
Tabel 2.13 Pemetaan permasalahan pelayanan kecamatan pagerbarang .....	23
Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pagerbarang .....	27
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pagerbarang.....	30
Tabel 3. 2 Strategi Kecamatan Pagerbarang KabupatenTegal Tahun 2025-2029.....	31
Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Kecamatan Pagerbarang.....	32
Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pagerbarang.....	33
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Kecamatan Pagerbarang .	36
Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan.....	40
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	44
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pagerbarang.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pagerbarang .....	8
Gambar 3. 1 Konsep Renstra Kecamatan Pagerbarang\.....	28
Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kecamatan Pagerbarang .....	29
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan resntra kecamatan Pagerbarang .....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kertas Kerja Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program .....	48
Lampiran 2 Metadata Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....	58
Lampiran 3 Casecading .....	72
Lampiran 4 Pohon Kinerja .....	75
Lampiran 5 Crosscutting .....	76
Lampiran 6 RTP .....	77

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Warureja Tahun 2025–2029 didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab dinamika pembangunan daerah dan tantangan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Kecamatan Warureja memiliki posisi strategis sebagai simpul penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan. Berbagai kondisi seperti tuntutan peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi antar-perangkat daerah, serta peran kecamatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum menjadi dasar penting penyusunan dokumen perencanaan ini.

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode lima tahun. Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal, serta selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi.

Amanat penyusunan Renstra perangkat daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan-tahapan:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Kecamatan Pagerbarang;
2. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Pagerbarang;
3. Forum Perangkat Daerah;
4. Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Pagerbarang;
5. Penetapan Renstra;
6. Rancangan Awal RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Renstra 2025-2029 Kecamatan Pagerbarang nantinya akan menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Untuk mengimplementasikan Renstra secara lebih operasional dan terukur setiap tahunnya, perangkat daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kantor Camat Pagerbarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- j. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
  - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.;
  - t. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - u. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  - v. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - w. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043;
  - x. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - y. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  - z. Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur kecamatan dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi instrumen penting untuk memastikan keselarasan perencanaan kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Tegal, serta memberikan landasan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang sistematis, terukur, dan akuntabel bagi kecamatan;
2. Menjamin keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kecamatan dengan kebijakan pembangunan daerah;
3. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan;
4. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi kinerja kecamatan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penyusunan Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Memuat gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra.

##### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat identifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025-2029.

##### **1.3 Maksud dan tujuan**

Memuat uraian tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025-2029.

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Memuat penjelasan tentang sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025-2029.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAGERBARANG**

### **2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pagerbarang**

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Pagerbarang**

Memuat uraian tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi Kecamatan Pagerbarang.

#### **2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Pagerbarang**

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki Kecamatan Pagerbarang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagerbarang**

Memuat data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan penunjang bidang pengawasan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Pagerbarang disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Pagerbarang**

Memuat uraian tentang kelompok sasaran layanan Kecamatan Pagerbarang.

#### **2.1.5 Mitra Kecamatan Pagerbarang dalam Pemberian Pelayanan**

Memuat uraian tentang mitra pemberian layanan Kecamatan Pagerbarang.

### **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pagerbarang**

#### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang**

Memuat uraian tentang identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal.

#### **2.2.2 Isu Strategis**

Memuat uraian tentang identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Inspektorat Kabupaten Tegal baik secara langsung ataupun tidak langsung.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pagerbarang**

Memuat uraian tujuan dan sasaran Kecamatan Pagerbarang disertai indikator dan target yang akan diwujudkan dalam tahun 2025-2029.

### **3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pagerbarang**

Memuat uraian tentang strategi serta dan arah kebijakan Kecamatan Pagerbarang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Memuat uraian tentang pohon kinerja dari tujuan, sasaran, outcome dan output, serta uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagu indikatif.

#### 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Memuat uraian tentang indikator dan target pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator terseleksi.

### BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAGERBARANG**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Pagerbarang**

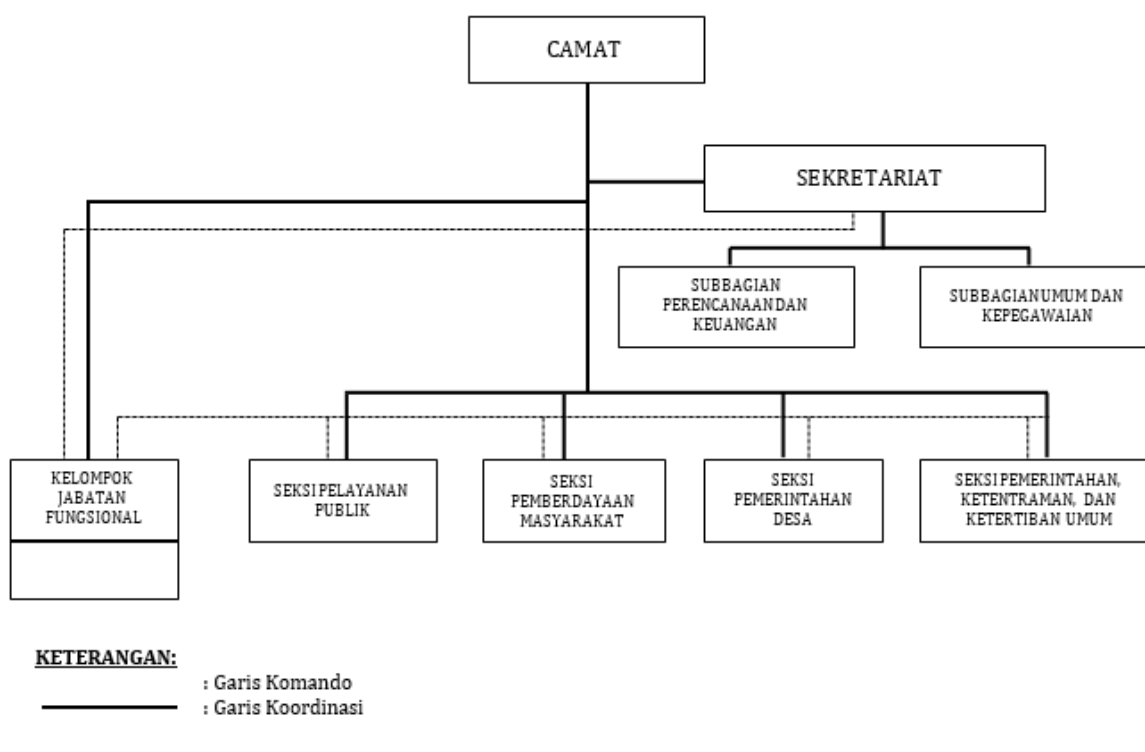
##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Pagerbarang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, Kecamatan Pagerbarang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur kewilayahan yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayahnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Pagerbarang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit organisasi Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- f. Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Pagerbarang terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi, terdiri dari ;
  - a. Seksi Pelayanan Publik;
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Seksi Pemerintahan Desa;
  - d. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pagerbarang

### 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Pagerbarang

1. Sumber Daya Manusia

Kondisi pegawai pada Kecamatan Pagerbarang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Kecamatan Pagerbarang

No	Jabatan	Kondisi SDM																	
		Gender			Tingkat Pendidikan						Golongan					Status Kepegawaian			
		L	P	Σ	SD / SMP	SM A	D3	S1	S2	Σ	I	II	III	IV	V	Σ	PNS	P3K	Σ
1	Camat	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kasi Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kasi Pemerintahan Desa	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1
8	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1
9	Penelaah Teknis Kebijakan	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1
10	Analisis Data	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1
11	Pengolah Data	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	1	1	-	-	2	2	-	2
12	Pengadministrasi Keuangan	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1
13	Pengadministrasi Kepegawaian	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1
14	Fasilitator Pemerintahan	1	1	2	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	2	-	2
15	Penata Kelola Pemerintahan	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1
16	Pranata Komputer Terampil	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1
17	Pengadministrasi Perkantoran	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1
18	Pengelola Umum Operasional	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>

Tabel 2.2 Kebutuhan Pegawai kecamatan Pagerbarang

No.	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan	Persentase Pemenuhan
1	Camat	1	1	0	100
2	Sekretaris Camat	1	1	0	100
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	1	0	100
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	0	1	0
5	Kasi Pelayanan Publik	1	0	1	0
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	0	1	0
7	Kasi Pemerintahan Desa	1	1	0	100
8	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	0	100
9	Fungsional	2	1	1	50
10	Pelaksana	19	11	8	57,89
<b>Total</b>		<b>29</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>58,62</b>

Tentu, berdasarkan data pada Tabel 2.2, berikut adalah narasi yang menjelaskan kondisi pegawai Kecamatan Pagerbarang, cocok untuk ditambahkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kondisi sumber daya manusia aparatur di Kecamatan Pagerbarang menunjukkan adanya kekurangan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai, yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kecamatan.

Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai (Tabel 2.2), total kebutuhan pegawai adalah 29 orang, sementara ketersediaan saat ini hanya 17 orang. Hal ini menghasilkan kesenjangan sejumlah 12 orang, dengan persentase pemenuhan secara keseluruhan baru mencapai 58,62%.

Kekurangan pegawai terjadi paling parah pada dua kelompok jabatan utama:

1. Jabatan Pelaksana: Kesenjangan terbesar terletak pada jabatan Pelaksana, di mana dibutuhkan 19 orang namun baru tersedia 11 orang, menyisakan kekurangan 8 orang. Jabatan ini merupakan tulang punggung dalam operasional teknis dan administratif harian kecamatan.
2. Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu: Terdapat kekurangan 1 orang pada beberapa jabatan struktural esensial yang sangat memengaruhi fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu:
  - Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Kebutuhan 1, Ketersediaan 0)

- Kasi Pelayanan Publik (Kebutuhan 1, Ketersediaan 0)
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat (Kebutuhan 1, Ketersediaan 0)
- Jabatan Fungsional (Kebutuhan 2, Ketersediaan 1)

Ketiadaan personil pada jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasi Pelayanan Publik, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat mengakibatkan persentase pemenuhan 0% pada ketiga posisi strategis ini. Kondisi ini secara langsung menimbulkan risiko serius terhadap optimalisasi manajemen kepegawaian, kualitas layanan publik, serta program pemberdayaan di tingkat masyarakat.

Meskipun demikian, beberapa jabatan inti telah terpenuhi 100%, menjamin stabilitas kepemimpinan dan koordinasi awal, antara lain:

- Camat
- Sekretaris Camat
- Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- Kasi Pemerintahan Desa
- Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Secara ringkas, tantangan utama SDM Kecamatan Pagerbarang adalah defisit kuantitas dan ketersediaan personil pada jabatan kunci pelayanan publik dan administrasi umum, yang harus menjadi prioritas tindak lanjut dalam periode Renstra 2025-2029 untuk menjamin peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.

## 2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana saat ini cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Pagerbarang. Keadaan sarana dan prasarana Kecamatan Pagerbarang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Daftar Aset Tanah

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M2)	Letak/ Alamat	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehan	Jml/ Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	Tanah Bangunan Kantor	2.675	Jl. Raya Timur No.1 Desa Jatiwangi Kec. Pagerbarang	1996	Pembelian	1	x		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per Desember 2024

Tabel 2.4 Daftar Aset Peralatan dan Mesin

No	Janis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehan	Jml/ Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	Sation Wagon	Ertiga GL	Besi	2012	Pembelian	1	x		
2	Sepeda Motor	Honda	Besi	2004	Pembelian	1	x		
3	Sepeda Motor	Vario	Besi	2015	Pembelian	2	x		
4	Sepeda Motor	Honda Supra	Besi	2016	Pembelian	2	x		
5	Sepeda Motor	Yamaha	Besi	2018	Pembelian	1	x		
6	Gerobak Dorong	-	Besi	2018	Pembelian	1	x		
7	Mesin Ketik Manual Standar	Brother	Besi	2018	Pembelian	1	x		
8	Lemari	Brother	Besi	1991	Pembelian	1	x		
9	Filling Cabinet	Brother	Besi	2012	Pembelian	2	x		
10	Layar LCD	-	Fiber	2016	Pembelian	1	x		
11	Meja Kerja	-	Kayu	2007	Pembelian	11	x		
12	Kursi Kerja	-	Kayu	2007	Pembelian	10	x		
13	Meja Rapat	-	Kayu	2018	Pembelian	31	x		
14	Tempat Tidur	-	Kayu	2005	Pembelian	1	x		
15	Meja Panjang	-	Kayu	2008	Pembelian	6	x		
16	Meja Makan	-	Kayu	2004	Pembelian	1	x		
17	Kursi Rapat	Broather	Besi, busa	2007	Pembelian	20	x		
18	Kursi Rapat	Broather	Besi	2014	Pembelian	16	x		
19	Kursi Rapat	Broather	Besi	2016	Pembelian	47	x		
20	Kursi Rapat	Broather	Besi	2017	Pembelian	100	x		
21	Kursi Putar	Broather	Besi	2007	Pembelian	6	x		
22	Kursi Putar	Broather	Besi	2012	Pembelian	3	x		
23	Bangku Tunggu	-	Besi	2012	Pembelian	4	x		
24	Bangku Tunggu	3 Seat	Besi	2018	Pembelian	5	x		
25	Meja Komputer	ProDesign	Plastik	2006	Pembelian	1	x		
26	Meja Komputer	-	Kayu	2012	Pembelian	1	x		
27	Sofa	Imperial	Kayu/ busa	2016	Pembelian	2	x		
28	Sofa	-	Kayu/ busa	2008	Pembelian	1	x		
29	Vacum Cleaner	Modena	Fiber	2018	Pembelian	1		x	
30	Mesin Pemootong	Modena	Besi	2018	Pembelian	1	x		
31	AC Split	Sharp	Fiber/Besi	2012	Pembelian	1	x		
32	AC Split	Sharp	Besi	2002	Pembelian	1	x		
33	AC Split	Sharp	Fiber	2016	Pembelian	4	x		
34	AC Split	Sharp	Fiber	2018	Pembelian	4	x		
35	Portable AC	Midea	Campuran	2021	Pembelian	2	x		
36	Sound System	BMB DA600	Fiber	2016	Pembelian	1	x		
37	Tustel	-	Fiber/Besi	2008	Pembelian	1	x		
38	Alat Hiasan	-	Kain	2018	Pembelian	1	x		
39	Tiang Bendera	-	Kayu	1998	Pembelian	1		x	
40	Alat Pemadam Portable	-	Besi	2013	Pembelian	1	x		
41	Alat Pemadam Portable	Bahari Fire	Besi	2019	Pembelian	3	x		
42	Kursi Kerja Pejabat Eselo	-	Besi	2019	Pembelian	9	x		
43	Projector	SONY	Fiber	2016	Pembelian	1	x		
44	Projector	INFOCU	Fiber	2017	Pembelian	1	x		
45	Camera Conference	Logitech	Metal	2021	Pembelian	1	x		
46	Pesawat Telephone	flexy	Fiber	2006	Pembelian	1	x		
47	Handy Talky	Icom	Fiber	1999	Pembelian	1	x		
48	PC Unit	Creative	Fiber	2004	Pembelian	1	x		
49	PC Unit	DELL	Fiber	2017	Pembelian	4	x		
50	PC Unit	LG	Fiber	2018	Pembelian	3	x		
51	PC Unit	AXIOO	Fiber	2024	Pembelian	2	x		
52	Laptop	ACER	Fiber	2013	Pembelian	1	x		

No	Janis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehan	Jml/ Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
53	Laptop	ACER/Aspire	Campuran	2020	Pembelian	4	x		
54	Lapatop	AXIOO	Campuran	2024	Pembelian	1	x		
55	Printer	CANON MP	Fiber	2017	Pembelian	3	x		
56	Printer	CANON IP280	Fiber	2018	Pembelian	4	x		
57	Printer	CANON PIXMA	Fiber	2018	Pembelian	4	x		
58	Sepeda Motor	Honda	Besi	1997	Pembelian	1			x
59	Printer	Epson	Campuran	2023	Pembelian	2	x		
60	Printer	Epsom	Campuran	2024	Pembelian	6	x		
61	Scanner	Epson	Campuran	2023	Pembelian	1	x		
62	Layar LCD	-	Campuran	2023	Pembelian	1	x		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per Desember 2024

Tabel 2.5 Daftar Aset Gedung dan Bangunan

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Status Tanah	Luas Lantai (M2)	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehan	Jml/ Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tanah Milik Pemda	70	-	Pembelian	1	x		
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tanah Milik Pemda	30	-	Pembelian	1	x		
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tanah Milik Pemda	70	-	Pembelian	1		x	
4	Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen	Tanah Milik Pemda	150	-	Pembelian	1		x	
5	Bangunan Gedung Hiburan/ Kesenian Permanen	Tanah Milik Pemda	130	-	Pembelian	1	x		
6	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	Tanah Milik Pemda	220	-	Pembelian	1		x	
7	Bangunan Tempat Parkir	Tanah Milik Pemda	78	-	Pembelian	1	x		
8	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Tanah Milik Pemda	200	-	Pembelian	1	x		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per Desember 2024

Tabel 2.6 Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/ Lokasi	Luas Lantai (M2)	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehan	Jml/ Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	Instalasi Gardu listrik Distribusi kapasitas Besar	Jl. Raya timur No.1 Pagerbarang	-	-	Pembelian	1	x		
2	Jalan Desa	-	-	-	Pembelian	1			x
3	Jalan Desa	Ds.Pagerbarang	-	-	Pembelian	1			x
4	Jalan Desa	Ds. Randusari	-	-	Pembelian	1			x
5	Jalan Desa	Ds. Sidomulyo	-	-	Pembelian	1			x
6	Jalan Desa	Ds. Randusari	-	-	Pembelian	1			x
7	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	-	-	-	Pembelian	1			x

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per Desember 2024

Tabel 2.7 Daftar Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Asal Daerah	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehan	Jml/ Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	Alat Musik Tradisional/ Daerah	-	Kuningan	2014	Pembelian	1	x		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per Desember 2024

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa secara umum ketersediaan sarana dan prasarana pada Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal cukup memadai. Akan tetapi, beberapa sarana prasarana perlu ditingkatkan. Ketersediaan sarana prasarana mendatang masih dibutuhkan tambahan unit PC, laptop, printer dan LCD Projector.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagerbarang

Indikator Kinerja Kecamatan Pagerbarang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pagerbarang. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagerbarang sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2020	Rasio Capaian pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.</b>	<b>Indikator Tujuan :</b>						
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Persen; Tahunan			77,63	77,63	100,00%
<b>2.</b>	<b>Indikator Sasaran :</b>						
	Persentase Jumlah Desa Mandiri	Persen; Tahunan			0	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Indikator Program :</b>						
	Jumlah Desa Mandiri	Desa			0	0	0,00%
	Jumlah Desa Berkembang	Desa			13	13	100,00%
	Jumlah Desa Tertinggal	Desa			0	0	0,00%
	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Persen; Tahunan			100	100	100,00%
<b>4.</b>	<b>Indikator Kegiatan:</b>						
	Persentase Kinerja Pemdес Sesuai Ketentuan	Persen			100	100	100,00%
	Persentase Konflik SARA Kecamatan (terjadi > 50% desa)	Persen			0	0	0,00%
	Persentase Desa Menyusun APBDesa Sesuai Ketentuan	Persen			100	100	100,00%
	Jumlah Data Kecamatan Terisi Akurat	Persen			100	100	100,00%
	Persentase Fasilitasi Kesra	Persen			100	75	75,00%
	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor	Kegiatan			10	10	100,00%
	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kegiatan			5	5	100,00%
	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Paket			2	2	100,00%
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan			3	3	100,00%
	Jumlah Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Dokumen			6	0	0,00%
	Jumlah Operasional Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Bulan			12	12	100,00%

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Tahun 2021	Rasio Capaian pada Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.</b>	<b>Indikator Tujuan :</b>						
	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan			78,88	81	102,69%
<b>2.</b>	<b>Indikator Sasaran :</b>						
	Persentase Jumlah Desa Mandiri	Persen; Tahunan			0	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Indikator Program :</b>						
	Jumlah Desa Mandiri	Desa			0	0	0,00%
	Jumlah Desa Berkembang	Desa			13	13	100,00%
	Jumlah Desa Tertinggal	Desa			0	0	0,00%
	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen; Tahunan			100	100	100,00%
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Persen; Tahunan			100	100	
<b>4.</b>	<b>Indikator Kegiatan:</b>						
	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen			100	100	100,00%
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen			100	100	0,00%
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen			100	100	100,00%
	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen			100	66,67	66,67%
	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			100	91,67	91,67%
	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			100	100	100,00%
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen			100	75	75,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Tahun 2021	Rasio Capaian pada Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen			100	59,09	59,09%
	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persen			100	75	75,00%
	Jumlah Desa Tertib Administrasi	Persen			100	50	50,00%
<b>5.</b>	<b>Indikator Subkegiatan:</b>						
	Dokumen Renstra; Renja: RKA; DPA; LPPD	Buku			5	5	100,00%
	Dokumen LKjIP; LKPJ; LAKIP/SAKIP; Evaluasi RKPD; LKPD	Buku			5	5	0,00%
	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun			1	1	100,00%
	Jumlah Bulan Honor Pengelola Keuangan yang Dibayarkan	Bulan			12	12	100,00%
	Jumlah Jenis Penerangan Bangunan Kantor	Jenis			8	8	100,00%
	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis			28	28	100,00%
	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Tersedia	Jenis			26	26	100,00%
	Jumlah Bulan Pegawai, Tamu dan Peserta Rapat Mendapatkan Jamuan	Bulan			12	12	100,00%
	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis			4	4	100,00%
	Jumlah Bahan Bacaan	Bulan			12	12	100,00%
	Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terpenuhi	Bulan			12	12	100,00%
	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin	Paket			2	1	50,00%
	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Kantor Lainnya	Paket			1	1	100,00%
	Jumlah Benda Pos (Materai)	Lembar			320	240	75,00%
	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Bulan			12	12	100,00%
	Jumlah Honor Tenaga Kebersihan dan Penjaga Malam Terbayarkan	Bulan			12	12	100,00%
	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara	Unit			12	12	100,00%
	Jumlah AC; Komputer; Laptop; Printer Terpelihara	Jenis			4	4	100,00%
	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	Paket			1	1	100,00%
	Rakor PBB (Penderasan); PATEN; IMB	Kegiatan			3	3	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Tahun 2021	Rasio Capaian pada Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tilik Desa; Pembinaan RT/RW; Pembinaan Lembaga Desaa BPD; Rakor Sanitasi dan Persampahan	Kegiatan			4	2	50,00%
	Musrenbang Kec/Des RKPD	Kegiatan			2	2	100,00%
	Rakor Kemiskinan; Festival Budaya; Rakor PAUD; MTQ; Rakor Pemuda; FASI; Yaumi; Posyandu; Pesta Siaga; PKBM; PKK	Kegiatan			11	2	18,18%
	HUT RI; Hari Jadi	Kegiatan			2	1	50,00%
	Forkompincam	Kegiatan			1	1	100,00%
	Monitoring Pembinaan Administrasi Desa	Kegiatan			1	0	0,00%
	Rakor Mitigasi Nmcana (Covid 19); Siskamling	Kegiatan			2	1	50,00%

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>1.</b>	<b>Indikator Tujuan :</b>												
	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan			1,25	1	1	0,03	2,71	1	2,40	271,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Indikator Sasaran :</b>												
	Peningkatan Persentase desa tertib administrasi	Persen; Tahunan			18	21	11	18	1,23	11	100,00	5,86	100,00
	Peningkatan Persentase desa mandiri	Persen; Tahunan			0	7,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	100,00
	Peningkatan Persentase desa maju	Persen; Tahunan			7,69	7,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Indikator Program :</b>												
	IKM Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan			80,13	81,13	82,13	81,03	83,74	82,13	101,12	103,22	100,00
	Persentase desa mandiri Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan			0	7,69	6	0	0	6	0,00	0,00	100,00
	Persentase desa maju Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan			15,38	23,07	0	7,69	7,69	0	50,00	33,33	0,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen; Tahunan			100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Persen; Tahunan			100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
	Peningkatan Persentase desa tertib administrasi	Persen; Tahunan			68	89	100	68	69,23	100	100,00	77,79	100,00
	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Persen; Tahunan			100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Indikator Kegiatan:</b>												
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Disusun Tepat Waktu	Dokumen			10	10	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Disusun Tertib Administrasi dan Tepat Waktu	Dokumen			12	12	12	12	9	12	100,00	75,00	100,00
	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan			12	12	12	12	9	12	100,00	75,00	100,00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	Persen			-	100	100	-	100	100	-	100,00	100,00
	Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bulan			12	12	12	12	9	12	100,00	75,00	100,00
	Jumlah BMD dalam Kondisi Baik	Persen			100	100	100	100	75	100	100,00	75,00	100,00
	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik Terkoordinasikan	Persen			100	100	100	100	0	100	100,00	0,00	100,00
	Persentase Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Terlaksanakan	Persen			100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
	Ketersediaan Data Perkembangan Desa	Desa			13	13	13	13	12	13	100,00	92,31	100,00
	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penanggulangan Bencana	Desa			13	13	13	13	12	13	100,00	92,31	100,00
	Jumlah Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan			1	1	1	1	0	1	100,00	0,00	100,00
	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persen			100	100	100	100	75	100	100,00	75,00	100,00
	Jumlah Desa Tertib Administrasi	Desa			9	11	11	9	9	11	100,00	81,82	100,00
<b>5.</b>	<b>Indikator Subkegiatan:</b>												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			5	5	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen			5	5	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB			16	16	12	16	13	12	100,00	81,25	100,00
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			12	12	12	12	9	12	100,00	75,00	100,00
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	1	1	1	0	1	100,00	0,00	100,00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			1	1	1	1	0	1	100,00	0,00	100,00
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	1	1	1	0	1	100,00	0,00	100,00
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			1	1	1	1	0	1	100,00	0,00	100,00
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			1	1	1	1	0	1	100,00	0,00	100,00
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen			12	12	12	12	9	12	100,00	75,00	100,00
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	12	12	12	9	12	100,00	75,00	100,00
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			0	1	0	1	1	0	-	100,00	0,00
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			0	0	3	0	0	3	-	0,00	100,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			150	150	12	150	9	12	100,00	6,00	100,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	12	12	12	9	12	100,00	75,00	100,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	12	12	12	9	12	100,00	75,00	100,00
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			7	8	8	7	7	8	100,00	87,50	100,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			1	16	16	1	15	16	100,00	93,75	100,00
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	1	1	1	0	1	100,00	0,00	100,00
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			0	1	1	0	1	1	-	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Dokumen			2	3	3	2	0	3	100,00	0,00	100,00
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan			3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dlm Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LK			20	20	20	20	20	20	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan Pagerbarang	Dokumen			2	2	2	2	0	2	100,00	0,00	100,00
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			8	11	11	7	2	11	87,50	18,18	100,00
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wiayah Kecamatan	Laporan			2	1	1	2	0	1	100,00	0,00	100,00
	Jumlah Laporan Korrdinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Laporan			1	1	1	1	0	1	100,00	0,00	100,00
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUDN RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan & Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Orang			100	130	130	100	130	130	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang			30	30	30	0	0	30	0	0	100,00
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen			12	12	12	12	9	12	100	75	100,00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen			3	4	4	1	0	4	33,3333	0	100,00
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen			4	5	5	4	1	5	100	20	100,00
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen			1	1	1	1	0	1	100	0	100,00
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen			0	1	1	0	0	1	0	0	100,00
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen			1	1	1	1	0	1	100	0	100,00
	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan			0	1	1	0	0	1	0	0	100,00

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2020	Keterangan
	<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan</b>				
1	Penyediaan Jasa Kantor	Rp. 77.200.000,00	Rp. 77.013.133,00	99,76 %	
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp. 27.486.000,00	Rp. 25.486.000,00	92,72 %	
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp. 75.893.000,00	Rp. 68.752.000,00	90,60 %	
4	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	0	0	0	Refocusing
5	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Rp. 15.040.000,00	Rp. 15.040.000,00	100 %	
6	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Rp. 155.000.000,00	Rp. 148.097.000,00	95,55 %	
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang</b>				
1	Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan	Rp. 30.916.000,00	Rp. 30.916.000,00	100 %	
2	Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	Refocusing
3	Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 30.569.000,00	Rp. 30.569.000,00	100 %	
4	Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 56.935.000,00	Rp. 47.945.000,00	84,21 %	
5	Peningkatan Layanan Umum	0	0	0	Refocusing
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 469.039.000,00</b>	<b>Rp. 443.818.133,00</b>		

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kecamatan Pagerbarang Kab. Tegal

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2021-2024 (Dalam Ribuan)

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antar Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.774.102	1.420.709	1.686.502	1.413.261	1.429.115	1.285.331	1.195.040	1.349.026	80,55	90,47	70,86	95,45	-5,80	-1,40
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.850	10.474	3.660	4.150	6.200	2.941	1.199	3.250	18,87	28,08	32,76	78,31	-39,93	19,76
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.100	5.345	1.000	1.270	4.039	1.861	700	1.270	56,88	34,81	70,00	100,00	-26,34	-11,63
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.750	5.129	2.660	2.880	2.161	1.080	499	1.980	8,39	21,06	18,76	68,75	-39,98	64,32
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.172.087	1.195.199	1.230.125	1.022.648	1.084.353	1.131.432	859.198	973.979	92,51	94,66	69,85	95,24	-3,99	-2,12
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.157.087	1.161.704	1.175.465	972.978	1.069.593	1.099.737	828.693	924.309	92,44	94,67	70,50	95,00	-5,21	-3,43
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peantusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000	33.495	54.660	49.670	14.760	31.695	30.505	49.670	98,40	94,63	55,81	100,00	59,12	57,94
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.350	82.596	70.685	73.311	46.411	42.784	39.270	67.570	53,13	51,80	55,56	92,17	-5,38	18,68
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500	1.813	2.178	2.173	1.308	668	868	2.173	37,36	36,85	39,85	100,00	-9,43	43,79
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	12.000	15.780	11.990	17.009	5.992	12.693	10.838	17.009	49,93	80,44	90,39	100,00	16,45	51,39
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000	6.805	3.415	3.491	852	1.628	1.840	3.491	17,03	23,92	53,88	100,00	-3,83	64,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.700	20.154	22.242	21.715	7.321	13.646	15.482	21.705	33,74	67,71	69,61	99,95	0,29	46,68
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.400	3.645	2.290	2.501	1.708	1.750	1.452	2.501	31,63	48,01	63,42	100,00	-20,16	19,21
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2.500	2.500	2.500	2.760	1.830	2.415	1.500	2.750	73,20	96,60	60,00	99,64	3,47	25,80
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.250	31.900	26.070	23.663	27.401	9.984	7.290	17.942	73,56	31,30	27,96	75,82	-13,96	18,52
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.010	-	29.130	90.570	207.129	-	28.680	90.520	56,59	0,00	98,46	99,94	36,97	38,54

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antar Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	29.130	-	-	-	28.680	-	0,00	0,00	98,46	0,00	-33,33	-33,33
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	175.000	-	-	20.000	21.980	-	-	19.950	12,56	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	191.010	-	-	70.570	185.149	-	-	70.570	96,93	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.315	69.890	72.490	-	60.484	63.663	41.946	-	94,04	91,09	57,86	0,00	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500	1.500	1.100	110.602	1.080	840	495	104.386	72,00	56,00	45,00	94,38	21,65	40,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.625	30.000	32.040	1.100	25.864	26.838	19.416	1.100	90,35	89,46	60,60	100,00	-8,89	19,64
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.190	38.390	39.350	50.162	33.540	35.985	22.035	45.076	98,10	93,74	56,00	89,86	22,72	36,09
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.490	62.550	280.413	59.340	24.538	44.511	224.747	58.210	47,66	71,16	80,15	98,10	21,86	44,23
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000	34.520	55.810	111.980	15.767	25.563	27.814	109.321	63,07	74,05	49,84	97,63	103,24	144,99
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000	13.780	11.040	58.310	4.556	6.400	5.770	55.802	30,37	46,44	52,26	95,70	34,74	57,19
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.490	14.250	13.563	15.470	4.215	12.548	-	15.390	36,68	88,06	0,00	99,48	4,04	65,78
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	-	-	200.000	38.200	-	-	191.163	38.129	0,00	0,00	95,58	99,81	66,95	0,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK	87.797	14.434	64.983	-	4.875	11.627	-	-	5,55	80,55	0,00	#DIV/0!	-33,33	-33,33
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	87.797	-	56.375	46.680	4.875	5.465	-	46.680	5,55	0,00	0,00	100,00	79,49	0,00
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.193	6.381	-	37.260	1.880	-	-	37.260	16,80	0,00	0,00	100,00	-44,64	0,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	76.604	6.381	56.375	-	2.995	5.465	-	-	3,91	85,64	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antar Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	8.053	8.608	37.260	-	6.162	-	37.260	0,00	76,52	0,00	100,00	219,30	0,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dg Kewenangan Lain yg Dilimpahkan	-	8.053	8.608	9.420	-	6.162	-	9.420	0,00	76,52	0,00	100,00	5,44	0,00
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	23.914	59.862	74.528	76.265	12.603	50.381	19.560	76.265	52,70	84,16	26,25	100,00	59,05	176,16
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.914	59.862	74.528	76.265	12.603	50.381	19.560	76.265	52,70	84,16	26,25	100,00	59,05	176,16
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.958	20.454	16.625	20.515	7.089	19.290	14.715	20.515	44,42	94,31	88,51	100,00	10,95	62,61
	SubKegiatan Sinkronisasi Program Kerja &Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah & Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	9.460	11.013	11.013	-	7.978	-	11.013	0,00	84,33	0,00	100,00	5,47	0,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.956	29.948	46.890	44.738	5.514	23.113	4.845	44.738	69,31	77,18	10,33	100,00	109,47	354,50
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	13.830	10.518	10.780	-	9.236	-	10.330	0,00	66,78	0,00	95,83	-7,15	0,00
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	10.010	6.375	6.850	-	6.288	-	6.850	0,00	62,81	0,00	100,00	-9,62	0,00
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	10.010	6.375	6.850	-	6.288	-	6.850	0,00	62,81	0,00	100,00	-9,62	0,00
2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	3.820	4.143	3.930	-	2.948	-	3.480	0,00	77,17	0,00	88,55	1,10	0,00
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau KNRI	-	3.820	4.143	3.930	-	2.948	-	3.480	0,00	77,17	0,00	88,55	1,10	0,00
V	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	58.502	48.939	79.838	82.923	36.144	40.305	56.631	81.878	61,78	82,36	70,93	98,74	16,88	32,20

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antar Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.502	48.939	79.838	82.923	36.144	40.305	56.631	81.878	61,78	82,36	70,93	98,74	16,88	32,20
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	34.486	13.367	26.425	29.960	15.144	10.305	23.361	28.915	43,91	77,09	88,40	96,51	16,61	39,51
	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	4.795	2.233	2.683	-	-	-	2.683	0,00	0,00	0,00	100,00	-11,09	0,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.016	30.777	51.180	50.280	21.000	30.000	33.270	50.280	87,44	97,48	65,01	100,00	30,90	34,96
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.668	31.332	54.098	28.830	500	18.963	3.565	28.830	4,69	60,52	6,59	100,00	73,22	1440,03
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	10.668	31.332	54.098	28.830	500	18.963	3.565	28.830	4,69	60,52	6,59	100,00	73,22	1440,03
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	10.672	16.540	6.855	-	6.883	-	6.855	0,00	64,50	0,00	100,00	-1,19	0,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	12.000	7.975	10.205	500	5.733	3.565	10.205	0,00	47,78	44,70	100,00	-1,86	398,35
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	2.788	6.960	6.960	-	2.175	-	6.960	0,00	78,03	0,00	100,00	49,90	0,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	5.872	18.050	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	5.872	2.340	2.340	-	4.172	-	2.340	0,00	71,05	0,00	100,00	-20,05	0,00
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	2.233	2.470	-	-	-	2.470	0,00	0,00	0,00	100,00	3,55	0,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.668	-	-	-	500	-	-	-	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J U M L A H		1.954.983	1.589.105	1.970.465	1.685.738	1.483.237	1.415.842	1.274.796	1.593.008	75,87	89,10	64,70	94,50	-3,06	3,49

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pagerbarang**

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagerbarang, identifikasi kelompok sasaran pelayanan merupakan bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai unit organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan umum dan pelayanan administratif kewilayahan, kecamatan pagerbarang memiliki kelompok sasaran yang harus diperhatikan secara strategis. Adapun kelompok sasaran pelayanan dalam Renstra Kecamatan Pagerbarang meliputi:

a. Masyarakat Umum

Kelompok ini mencakup seluruh warga yang berdomisili di wilayah kecamatan pagerbarang dan menjadi penerima layanan administratif dan non-administratif. Pelayanan kepada masyarakat umum meliputi penerbitan surat keterangan, layanan kependudukan, fasilitasi penyelesaian permasalahan sosial, serta informasi layanan publik lainnya. Masyarakat juga menjadi mitra utama dalam perencanaan pembangunan partisipatif.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan sasaran strategis dalam kerangka pembinaan, pengawasan, dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. Dalam Renstra, kecamatan pagerbarang diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, asistensi perencanaan dan penganggaran, serta fasilitasi pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pelaku UMKM menjadi kelompok sasaran dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, kecamatan pagerbarang berperan memberikan dukungan berupa fasilitasi perizinan, informasi program pemberdayaan, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung pengembangan usaha.

d. Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial

Termasuk di dalamnya RT/RW, PKK, karang taruna, dan organisasi keagamaan yang berperan aktif dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Renstra Kecamatan Pagerbarang perlu memuat strategi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan yang memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

e. Instansi Vertikal dan Lintas Sektor di Wilayah Kecamatan

Sebagai simpul koordinasi wilayah, kecamatan pagerbarang juga menjadi mitra strategis bagi instansi vertikal, perangkat daerah lain, dan lembaga swasta yang berada di wilayahnya. Kelompok ini menjadi sasaran dalam konteks koordinasi

program pembangunan, penanganan bencana, serta penyelesaian isu-isu lintas sektor.

Melalui penetapan kelompok sasaran ini, Renstra Kecamatan Pagerbarang diarahkan untuk menghasilkan kebijakan dan program yang tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah kecamatan pagerbarang. Dengan demikian, kecamatan pagerbarang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi garda depan pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal.

### **2.1.5 Mitra Kecamatan Pagerbarang Dalam Pemberian Layanan**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik, kecamatan tidak dapat bekerja secara sendiri. Kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagerbarang, perlu diidentifikasi dan dikuatkan peran mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan.

Mitra perangkat daerah bagi kecamatan pagerbarang terdiri dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pelayanan di tingkat wilayah. Mitra-mitra tersebut meliputi:

- a. Perangkat Daerah Teknis di Lingkup Kabupaten  
Kecamatan Pagerbarang berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, dan lainnya. Kolaborasi ini penting dalam pelaksanaan program-program lintas sektor, penanganan pelayanan dasar, serta fasilitasi kegiatan pembangunan di desa.
- b. Instansi Vertikal dan Forkopimcam  
Instansi vertikal seperti Polsek, Koramil, KUA, dan UPT kementerian/lembaga di wilayah kecamatan pagerbarang merupakan mitra strategis dalam hal pelayanan keamanan, ketertiban, administrasi keagamaan, pendidikan, dan pelayanan teknis lainnya. Koordinasi melalui forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) sangat penting untuk mendukung stabilitas wilayah dan sinergi pelayanan.
- c. Pemerintah Desa  
Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah, desa merupakan mitra utama kecamatan pagerbarang dalam menjalankan berbagai program pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan Pagerbarang berperan membina, mengarahkan, serta mendukung kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.

- d. **Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial**  
Kecamatan Pagerbarang menjalin kemitraan dengan RT/RW, PKK, karang taruna, kelompok tani, serta organisasi masyarakat lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanganan isu sosial, dan penguatan partisipasi publik dalam pembangunan wilayah.
- e. **Dunia Usaha dan Sektor Swasta**  
Dunia usaha dan pelaku ekonomi lokal turut menjadi mitra strategis kecamatan pagerbarang dalam mendukung pembangunan ekonomi wilayah. Kolaborasi ini dapat berupa penyediaan lapangan kerja, pelaksanaan program CSR, serta dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan UMKM.
- f. **Lembaga Pendidikan, Tokoh Masyarakat, dan Media Lokal**  
Kemitraan dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, dan media lokal sangat membantu dalam penyebaran informasi publik, edukasi masyarakat, serta pembentukan opini publik yang mendukung kebijakan dan program kecamatan pagerbarang.

Penguatan kemitraan dengan berbagai pihak ini menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik. Kecamatan Pagerbarang berperan sebagai pusat koordinasi pelayanan dan pembangunan yang mampu menyinergikan peran seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pagerbarang**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang**

Dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa, Kecamatan Pagerbarang menghadapi beberapa permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan, baik faktor penghambat maupun faktor pendorong dapat meningkatkan kinerja pelayanan di Kecamatan Pagerbarang. Sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tegal, Kecamatan Pagerbarang turut menghadapi beragam permasalahan pelayanan publik yang berakar dari isu-isu pembangunan daerah yang diuraikan dalam Bab II RPJMD 2025–2029.

Permasalahan pelayanan Kecamatan Pagerbarang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagerbarang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.13 Pemetaan permasalahan pelayanan kecamatan pagerbarang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Pagerbarang perlu dioptimalkan	Kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan belum memenuhi harapan masyarakat	Standar pelayanan belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten
			Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masih terbatas
2.	Masih rendahnya angka tertib administrasi desa Kecamatan	Masih kurangnya keterlibatan LKD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Peran lembaga kemasyarakatan di desa (LPMD, BPD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) belum berjalan optimal.
		Upaya fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal	Kurangnya koordinasi trantibum di masyarakat
		Fungsi kecamatan dalam fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kecamatan belum maksimal	Masih terbatasnya sumber daya aparatur dalam melaksanakan fungsi koordinasi lintas sektor
		Penyusunan administrasi pemerintahan desa belum tertib dan seragam sesuai ketentuan	Pengawasan dan pembinaan administrasi desa dari kecamatan belum insentif

### 2.2.2 Isu-Isu Strategis

Hasil analisis perkembangan dan masalah kewilayahan dipadukan dengan batasan tugas dan peran Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif, Kecamatan Pagerbarang menetapkan peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi dan keterjangkauan sebagai salah satu isu strategis utama. Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan pelayanan yang selama ini masih bersifat manual, lambat, dan kurang terintegrasi. Namun, transformasi ini tidak hanya berfokus pada modernisasi sistem, tetapi juga pada keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Artinya, digitalisasi harus dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan, literasi digital warga, serta ketersediaan sarana pendukung seperti jaringan internet dan perangkat

teknologi. Pendekatan inklusif menjadi kunci agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan antara kelompok masyarakat yang melek teknologi dan yang belum.

## 2. Penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti LPMD, BPD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, dan Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Namun, peran LKD di Kecamatan Pagerbarang saat ini belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta belum efektifnya koordinasi antara pemerintah desa dengan LKD. Kondisi tersebut menyebabkan potensi LKD sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Padahal, keberadaan LKD sangat krusial untuk memperkuat demokrasi desa, meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar, serta menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan peran LKD menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam Renstra Kecamatan Pagerbarang 2025–2029. Upaya penguatan diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM LKD, optimalisasi fungsi koordinasi dan sinergi dengan pemerintah desa, serta pemberian ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, LKD dapat berfungsi secara efektif sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat, sekaligus menjadi mitra pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## 3. Penguatan fasilitasi dan koordinasi dalam menjaga kerukunan serta toleransi di masyarakat

Kecamatan Pagerbarang merupakan wilayah dengan masyarakat yang beragam dari sisi sosial, budaya, dan keagamaan. Keberagaman ini merupakan potensi besar dalam memperkuat persatuan, namun sekaligus dapat menimbulkan kerentanan apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan, kepentingan, maupun dinamika sosial dapat memicu gesekan antarwarga. Oleh karena itu, peran kecamatan sebagai fasilitator dan koordinator menjadi sangat penting dalam menjaga kerukunan serta membangun toleransi di tengah masyarakat. Saat ini, upaya fasilitasi dan koordinasi dalam menjaga kerukunan belum berjalan optimal. Forum komunikasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan belum dilaksanakan secara rutin dan terstruktur. Selain itu, mekanisme deteksi dini dan mediasi konflik sosial masih terbatas,

sehingga potensi permasalahan sosial belum dapat diantisipasi secara cepat dan tepat.

Penguatan fasilitasi dan koordinasi diarahkan pada peningkatan peran kecamatan dalam membangun jejaring komunikasi lintas elemen masyarakat, memperkuat forum kerukunan, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam mediasi dan resolusi konflik. Dengan langkah ini, diharapkan tercipta suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan kondusif, sehingga pembangunan di Kecamatan Pagerbarang dapat berlangsung dengan aman, inklusif, dan berkelanjutan.

#### 4. Optimalisasi fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan perangkat kecamatan

Kecamatan memiliki posisi strategis sebagai perangkat daerah yang menjalankan sebagian kewenangan bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pembinaan pemerintahan desa. Peran camat tidak hanya sebagai penyelenggara administrasi, tetapi juga sebagai koordinator lintas sektor, fasilitator pembangunan, dan pembina perangkat kecamatan maupun desa. Dengan demikian, optimalisasi fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

Namun, dalam praktiknya, fungsi tersebut belum berjalan maksimal. Masih terdapat keterbatasan dalam koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga beberapa program pembangunan belum sepenuhnya terintegrasi di tingkat kecamatan. Mekanisme pembinaan perangkat kecamatan dan desa juga belum terstruktur secara sistematis, baik dari sisi peningkatan kapasitas aparatur maupun pengawasan pelaksanaan tugas. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi camat.

Oleh karena itu, optimalisasi fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur kecamatan, penyusunan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan perangkat daerah dan desa, serta peningkatan kualitas pembinaan yang berkelanjutan. Dengan langkah ini, diharapkan kecamatan dapat berperan lebih aktif sebagai simpul koordinasi pembangunan, pusat pelayanan masyarakat, dan pembina pemerintahan desa, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel di Kecamatan Pagerbarang.

#### 5. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa

Administrasi pemerintahan desa merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan tertib. Administrasi yang baik tidak hanya mendukung kelancaran pelayanan publik, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Di Kecamatan Pagerbarang, tertib administrasi pemerintahan desa masih menghadapi sejumlah

tantangan. Beberapa desa belum sepenuhnya melaksanakan pencatatan administrasi sesuai ketentuan, baik dalam hal administrasi umum, administrasi kependudukan, maupun administrasi keuangan. Kapasitas aparatur desa yang bervariasi, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya pengawasan dan pembinaan rutin dari kecamatan turut memengaruhi kualitas administrasi desa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam pengelolaan dokumen, keterlambatan laporan, hingga kurangnya akurasi data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan.

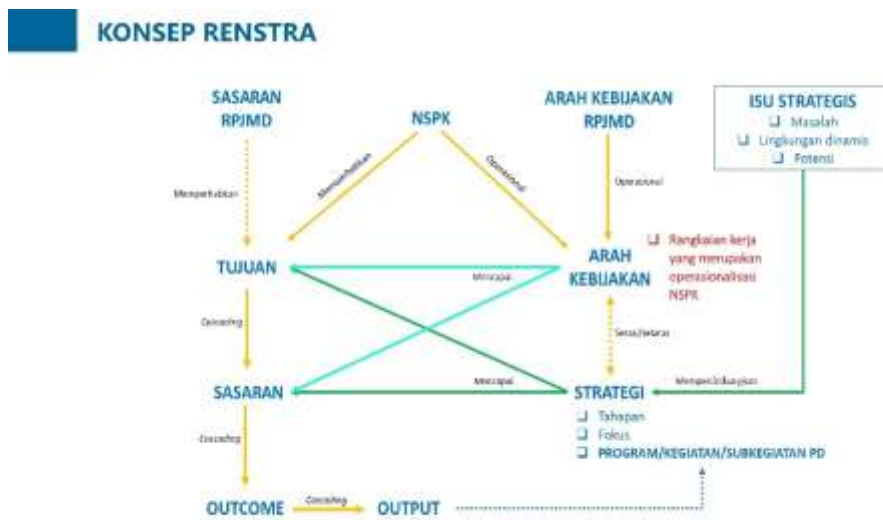
Oleh karena itu, peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian dalam Renstra Kecamatan Pagerbarang 2025–2029. Upaya penguatan diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan, optimalisasi penggunaan aplikasi administrasi desa berbasis digital, serta penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh kecamatan. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh desa di Kecamatan Pagerbarang mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan secara tertib, akurat, dan sesuai regulasi, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna.

Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pagerbarang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan kapasitas aparatur dan digitalisasi pelayanan	Kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan belum memenuhi harapan masyarakat	Penyediaan infrastruktur layanan dasar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan			Digitalisasi layanan pemerintahan, tuntutan pelayanan publik cepat dan transparan	Peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan
Revitalisasi peran LKD dalam musyawarah desa	Masih kurangnya keterlibatan LKD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kapasitas kelembagaan desa dan kecamatan untuk tata kelola yang berkelanjutan			Penguatan peran camat sebagai koordinator wilayah, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan serta administrasi desa	Penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
Pembentukan forum kerukunan masyarakat	Upaya fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal	Potensi konflik sosial dan intoleransi		Penguatan Kelembagaan lokal dalam SDGs Desa		Penguatan fasilitasi dan koordinasi dalam menjaga kerukunan serta toleransi di masyarakat
Forum koordinasi lintas desa dan kecamatan	Fungsi kecamatan dalam fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kecamatan belum maksimal	Belum optimalnya integrasi kebijakan lintas sektor		Sinergi lintas sektor dan wilayah		Optimalisasi fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan perangkat kecamatan
Pelatihan tata kelola dokumen dan pelaporan	Penyusunan administrasi pemerintahan desa belum tertib dan seragam sesuai ketentuan	Rendahnya efisiensi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan		Penguatan sistem informasi pemerintahan desa		Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3. 1 Konsep Renstra Kecamatan Pagerbarang\

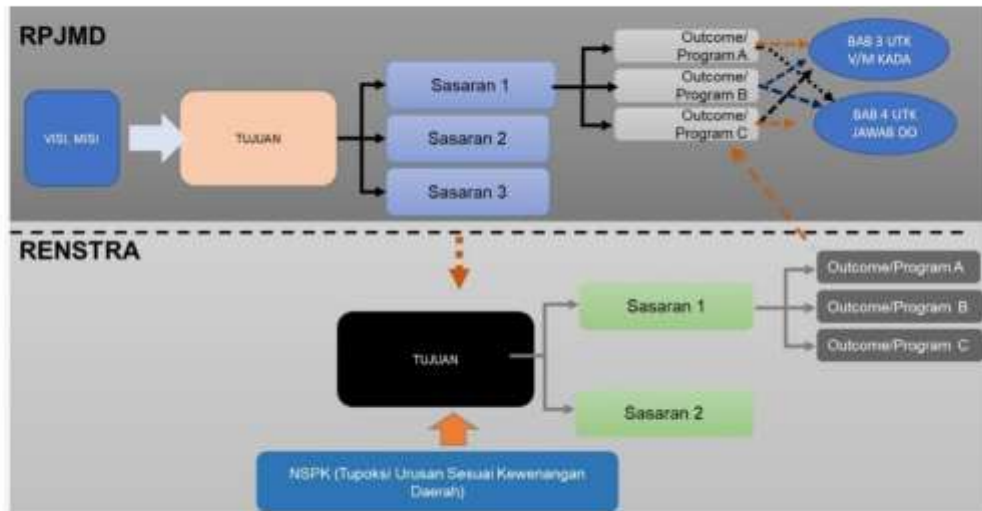
#### 3.1.1 Tujuan Renstra PD

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025–2029 menetapkan tujuan strategis yang selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tujuan ini dirumuskan dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kecamatan, serta mengacu pada sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tegal. Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun periode tahun 2025-2029 di Kecamatan Pagerbarang yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

#### 3.1.2 Sasaran Renstra PD

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan Pagerbarang menetapkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan”, dengan indikator keberhasilan sasaran diukur dari persentase tertib administrasi desa.

## KETERKAITAN RENSTRA DENGAN RPJMD



Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kecamatan Pagerbarang

Perumusan tujuan dan sasaran, indikator dan target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pagerbarang

No	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	NSPK: Diantara tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dan standar penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		IKM Kecamatan	Nilai; Tahunan	83,72	84	84,3	84,6	84,9	85,2	85,5
2	NSPK: Kriteria desa tertib administrasi adalah desa melaporkan LPPD tepat waktu, tata arsip teratur, serta taat aturan pengelolaan keuangan desa. Sasaran RPJMD Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase tertib administrasi desa	Persen; Tahunan	N/A	52,44	58	64	70	77	84

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pagerbarang

#### 3.2.1 Strategi Renstra Kecamatan Pagerbarang

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, Kecamatan Pagerbarang menetapkan Strategi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Strategi Kecamatan Pagerbarang KabupatenTegal Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif.
		Pengembangan sistem layanan administrasi terpadu (digitalisasi pelayanan) untuk meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan.
		Peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan.
		Optimalisasi peran kecamatan sebagai fasilitator dan koordinator pembangunan di wilayah desa/kelurahan.
		Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan desa untuk mendukung tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

Adapun tahapan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Kecamatan Pagerbarang

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsolidasi kelembagaan kecamatan dan peningkatan kapasitas aparatur.</li> <li>• Pemetaan awal kualitas pelayanan publik dan kondisi administrasi desa.</li> <li>• Penguatan koordinasi dasar antar perangkat daerah dan lembaga kemasyarakatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan standar pelayanan publik di kecamatan (SPM/SPP).</li> <li>• Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pemberdayaan masyarakat.</li> <li>• Penerapan sistem monitoring dan evaluasi administrasi desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi pelayanan berbasis digital/terpadu (PATEN berbasis TI).</li> <li>• Penguatan fasilitasi dan koordinasi ketentraman, ketertiban, serta kerukunan masyarakat.</li> <li>• Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan desa melalui asistensi rutin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi efektivitas koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan kecamatan.</li> <li>• Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat.</li> <li>• Peningkatan keterlibatan masyarakat dan LKD dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsolidasi hasil capaian pelayanan publik yang berkualitas dan responsif.</li> <li>• Tercapainya tertib administrasi desa secara menyeluruh.</li> <li>• Terwujudnya kecamatan sebagai simpul pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.</li> </ul>

### 3.2.2 Kebijakan Renstra PD

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pagerbarang dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pagerbarang. Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pagerbarang

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pagerbarang	Keterangan
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan pelimpahan bupati/wali kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>2. Diantara tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dan standar penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum.</li> <li>3. Tata cara pelaksanaan tugas harus memperhatikan prosedur penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, prosedur, asiliasi, koordinasi, dan pembinaan desa/kelurahan, prosedur penanganan ketenteraman dan ketertiban umum bersama Satpol PP dan aparat terkait, dan prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat.</li> <li>4. Kriteria kecamatan yang efektif adalah memiliki struktur organisasi lengkap, SDM memadai, sarana prasarana pendukung, serta kinerja pelayanan publik yang terukur.</li> <li>5. Kriteria desa tertib administrasi adalah desa melaporkan LPPD tepat waktu, tata arsip teratur, serta taat aturan pengelolaan keuangan desa.</li> <li>6. Kriteria pelayanan kecamatan yang baik adalah cepat, tepat, transparan, responsif, dan sesuai standar pelayanan.</li> </ol>	<p>Penguatan digitalisasi mendukung tata kelola, supervisi, dan diseminasi program pembangunan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan standar pelayanan publik kecamatan sesuai asas kepastian, keterbukaan, dan akuntabilitas.</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan evaluasi kinerja secara berkala.</li> <li>3. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam proses layanan administrasi dan komunikasi pemerintahan.</li> <li>4. Memperkuat forum koordinasi antara kecamatan dengan perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan, dan stakeholder lainnya.</li> <li>5. Memprioritaskan fasilitasi, supervisi, dan asistensi administrasi desa agar tertib, tepat waktu, dan sesuai regulasi.</li> </ol>	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

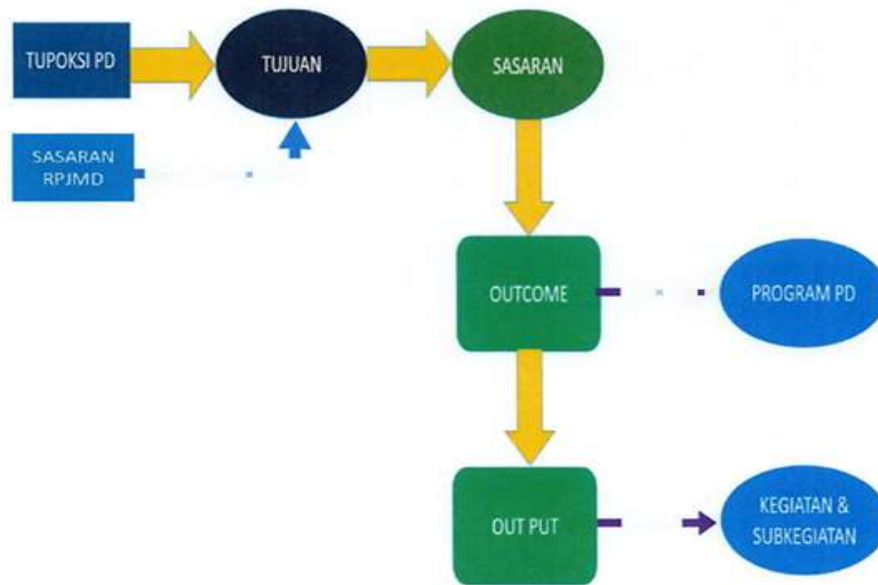
#### **4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029, Kecamatan Pagerbarang menyusun rencana strategis sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, Kecamatan Pagerbarang menetapkan sejumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang secara sistematis, terarah, dan terukur. Program dan kegiatan tersebut tidak hanya mencerminkan tanggung jawab administratif, tetapi juga mencerminkan upaya percepatan pelayanan publik, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa, serta penguatan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan.

Setiap program dikembangkan berdasarkan analisis terhadap isu strategis, kebutuhan masyarakat, serta potensi wilayah, dan selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian, struktur program dalam Renstra ini mencerminkan integrasi antara perencanaan strategis jangka menengah dan implementasi tahunan yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagerbarang.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Mendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga memberikan kepastian arah kebijakan dan dasar penganggaran dalam lima tahun ke depan.



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan resntra kecamatan Pagerbarang

Uraian program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Pagerbarang sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Kecamatan Pagerbarang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	K E T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
NSPK :	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				IKM Kecamatan Pagerbarang		
7. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan pelimpahan bupati/wali kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan			Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Pagerbarang		
8. Diantara tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dan standar penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum.			Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan kepuasan atas pelayanan publik		Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
9. Tata cara pelaksanaan tugas harus memperhatikan				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Urusan Pemeintahan yagn Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	K E T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	
<p>prosedur penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, prosedur, asilitasi, koordinasi, dan pembinaan desa/kelurahan, prosedur penanganan ketenteraman dan ketertiban umum bersama Satpol PP dan aparat terkait, dan prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat.</p> <p>10. Kriteria kecamatan yang efektif adalah memiliki struktur organisasi lengkap, SDM memadai, sarana prasarana pendukung, serta kinerja pelayanan publik yang terukur.</p> <p>11. Kriteria desa tertib administrasi adalah desa melaporkan LPPD tepat waktu, tata arsip teratur, serta taat aturan pengelolaan keuangan desa.</p> <p>12. Kriteria pelayanan</p>						Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepd camat	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
				Meningkatnya persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan desa di wilayah kecamatan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pembedayaan masyarakat	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
							Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
							Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	
							Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya penyelesaian gangguan ketenteraman dan		Persentase gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	K E T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	
kecamatan yang baik adalah cepat, tepat, transparan, responsif, dan sesuai standar pelayanan.  Sasaran RPJMD : Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan			ketertiban umum di wilayah kecamatan		Kecamatan Pagerbarang			
				Terselenggaranya fasilitasi penanggulangan bencana pada sejumlah desa melalui kegiatan koordinasi trantibum	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan LINMAS	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
							Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya kegiatan koordinasi penegakan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan Perundang-undangan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
							Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
				Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kecamatan melalui kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
					Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	K E T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
						Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
						Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya persentase tertib administrasi desa di Kecamatan Pagerbarang		Persentase desa dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tepat waktu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah dokumen tertib administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
						Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	Satuan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
UNSUR KEWILAYAHAN																
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	Persen; Tahunan	100	50.057.500	100	59.732.000	100	59.732.000	100	60.329.350	100	60.932.700	100	60.932.700	
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	5	Kegiatan	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	5	Dokumen	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	N/A	Kegiatan	0	0	1	11.732.000	1	11.732.000	1	12.329.350	1	12.932.700	1	12.932.700	
Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	N/A	Laporan	0	0	1	11.732.000	1	11.732.000	1	12.932.700	1	12.932.700	1	12.932.700	
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	2	Kegiatan	2	10.057.500	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	3	Laporan	2	10.057.500	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	N/A	Persen; Tahunan	62,5	86.970.000	66,67	81.819.000	70,83	82.637.200	75	82.637.200	79,17	83.463.600	83,33	83.463.600	
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah LKD Aktif	N/A	Lembaga Kemasyarakatan	26	86.970.000	33	81.819.000	40	82.637.200	47	82.637.200	52	83.463.600	59	83.463.600	
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	6	Lembaga Kemasyarakatan	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	
Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Diakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kecamatan Pagerbarang	1	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	8	Dokumen	8	56.970.000	8	51.819.000	8	52.637.200	8	52.637.200	8	53.463.600	8	53.463.600	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Transtibum Yang Dapat Ditindaklanjuti Kecamatan Pagerbarang	100	Persen; Tahunan	100	19.420.000	100	19.450.000	100	19.450.000	100	19.644.500	100	19.841.000	100	19.841.000	
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Penyelenggaraan LINMAS	13	Desa	13	10.420.000	13	10.450.000	13	10.450.000	13	10.644.500	13	10.841.000	13	10.841.000	
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	10.420.000	2	10.450.000	2	10.644.500	2	10.841.000	2	10.450.000	2	10.450.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1	Kegiatan	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil koordinasi/ Siergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	100	Persen; Tahunan	100	168.418.000	100	160.353.600	100	161.957.150	100	161.957.150	100	163.576.750	100	163.576.750	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	Satuan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4	Kegiatan	4	168.418.000	4	160.353.600	4	161.957.150	4	161.957.150	4	163.576.750	4	163.576.750	
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	130	Orang	130	113.138.000	130	105.353.600	130	106.957.150	130	106.957.150	130	108.576.750	130	108.576.750	
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	30	Orang	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	12	Dokumen	12	50.280.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tepat Waktu	N/A	Persen; Tahunan	50	29.010.000	57,69	49.749.800	63,46	49.749.800	69,23	50.247.300	75	50.749.800	78,85	50.749.800	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Tertib Administrasi Desa	N/A	Dokumen	197	29.010.000	217	49.749.800	241	49.749.800	264	50.247.300	290	50.749.800	317	50.749.800	
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Adminitrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	1	5.510.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Ranka Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dokumen	4	10.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	1	Dokumen	1	10.000.000	1	25.249.800	1	25.249.800	1	25.747.300	1	26.249.800	1	26.249.800	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	Dokumen	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	100	Persen; Tahunan	100	2.252.954.500	100	1.852.144.900	100	1.870.666.350	100	1.889.373.050	100	1.908.266.800	100	1.908.266.800	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Disusun Tepat Waktu	9	Dokumen	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Disusun Tertib Administrasi Dan Tepat Waktu	14	Dokumen	14	1.782.454.500	14	1.381.644.900	14	1.400.166.350	14	1.418.873.050	14	1.437.766.800	14	1.437.766.800	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	16	Orang/ bulan	18	1.732.454.500	18	1.331.644.900	18	1.350.166.350	18	1.368.873.050	18	1.387.766.800	18	1.387.766.800	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Layanan Kepegawaian Sesuai Ketentuan	N/A	Kegiatan	2	21.500.000	2	21.500.000	2	21.500.000	2	21.500.000	2	21.500.000	2	21.500.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	Paket	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	Satuan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	N/A	Orang	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pemenuhan Administrasi Umum Yang Disediakan	7	Paket	7	111.500.000	7	111.500.000	7	111.500.000	7	111.500.000	7	111.500.000	7	111.500.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1	Paket	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	1	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12	Dokumen	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Yang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah (BMD) Yang Disediakan	13	Unit	6	95.000.000	6	95.000.000	6	95.000.000	25	95.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	0	Unit	1	35.000.000	1	0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	9	Unit	5	60.000.000	5	95.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang Disediakan	4	Unit	0	-	0	-	0	-	20	35.000.000	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan	3	Paket	3	113.500.000	3	113.500.000	3	113.500.000	3	113.500.000	3	113.500.000	3	113.500.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	2	1.500.000	2	1500000	2	1500000	2	1500000	2	1500000	2	1500000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	13	Laporan	13	62.000.000	13	62.000.000	13	62.000.000	13	62.000.000	13	62.000.000	13	62.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Yang Selesai Dipelihara	25	Unit	25	119.000.000	25	119.000.000	25	119.000.000	25	119.000.000	25	119.000.000	25	119.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jbaatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	7	Unit	8	73.000.000	8	73.000.000	8	73.000.000	8	73.000.000	8	73.000.000	8	73.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	Satuan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara Lainnya	16	Unit	16	16.000.000	16	16.000.000	16	16.000.000	16	16.000.000	16	16.000.000	16	16.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
					<b>2.115.767.400</b>		<b>2.170.657.400</b>		<b>1.939.366.600</b>		<b>1.892.268.000</b>		<b>1.942.119.000</b>		<b>2.052.290.700</b>	

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya persentase tertib administrasi desa di Kecamatan Pagerbarang	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Prioritas berdasarkan Tabel III.7 RPJMD Kabupatentegal Tahun 2025-2029
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

#### 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pagerbarang

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pagerbarang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 secara rinci sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pagerbarang

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Indikator Tujuan:</b>								
	IKM Kecamatan	Nilai; Tahunan	84,00	84,30	84,60	84,90	85,20	85,50	
<b>2</b>	<b>Indikator Sasaran:</b>								
	Persentase tertib administrasi desa	Persen; Tahunan	52,44	58,00	64,00	70,00	77,00	84,00	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagerbarang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Tegal serta memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat. Substansi penting dari Renstra ini adalah komitmen Kecamatan Pagerbarang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong tertib administrasi desa yang akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Pagerbarang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Setiap program dan kegiatan dijalankan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku. Renstra ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya, sehingga terdapat kesinambungan antara perencanaan strategis lima tahunan dengan rencana operasional tahunan yang lebih rinci dan terukur. Dengan demikian, arah pembangunan di tingkat kecamatan dapat dijalankan secara konsisten dan sesuai prioritas. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran, pelaksanaan Renstra senantiasa didukung oleh mekanisme pengendalian dan evaluasi secara berkala.

Pengendalian dilakukan melalui monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk menilai capaian kinerja, efektivitas kebijakan, serta kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi dasar penting dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian perencanaan di tahun berikutnya, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kecamatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pagerbarang 2025–2029 ini, diharapkan seluruh aparatur kecamatan memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Komitmen bersama yang dibangun melalui dokumen ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, koordinasi pemerintahan yang lebih solid, serta tata kelola desa yang semakin tertib dan akuntabel, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Tegal yang lebih maju dan sejahtera.

Pagerbarang, 16 September 2025

CAMAT PAGERBARANG



**PRIHARYONO, S.STP., MPSSp**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790210/199810 1 002

Lampiran 1 Kertas Kerja Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program

**Indikator Nilai IKM Kecamatan**

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN PAGERBARANG KAB. TEGAL TAHUN .....		
No	Unit Kerja	Nilai IKM pada aplikasi "SEPAKAT"
1	Kecamatan Pagerbarang	

## Indikator Persentase Tertib Administrasi Desa

TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL TAHUN .....				
DASAR: PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016				
DESA : .....				
No	Ruang Lingkup Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.</b>	<b>Administrasi Umum</b>			
a.	Buku Peraturan Di Desa			- Jumlah buku 9 = 100%
b.	Buku Keputusan Kepala Desa			- Jumlah buku 8 = 90%
c.	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa			- Jumlah buku 7 = 80%
d.	Buku Aparat Pemerintah Desa			- Jumlah buku 6 = 70%
e.	Buku Tanah Kas Desa			- Jumlah buku 5 = 60%
f.	Buku Tanah di Desa			- Jumlah buku 4 = 50%
g.	Buku Agenda			- Jumlah buku 3 = 40%
h.	Buku Ekspedisi			- Jumlah buku 2 = 30%
i.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa			- Jumlah buku 1 = 20%
<b>JUMLAH</b>				
<b>2.</b>	<b>Administrasi Penduduk</b>			
a.	Buku Induk Penduduk			- Jumlah buku 5 = 100%
b.	Buku Mutasi Penduduk Desa			- Jumlah buku 4 = 80%
c.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk			- Jumlah buku 3 = 60%
d.	Buku Penduduk Sementara			- Jumlah buku 2 = 40%
e.	Buku KTP dan Buku KK			- Jumlah buku 1 = 20%
<b>JUMLAH</b>				
<b>3.</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>			
a.	Buku APB Desa			- Jumlah buku 6 = 100%
b.	Buku Rencana Anggaran Biaya			- Jumlah buku 5 = 85%
c.	Buku Kas Pembantu Kegiatan			- Jumlah buku 4 = 70%
d.	Buku Kas Umum			- Jumlah buku 3 = 55%
e.	Buku Kas Pembantu			- Jumlah buku 2 = 40%
f.	Buku Bank Desa			- Jumlah buku 1 = 25%
<b>JUMLAH</b>				
<b>4.</b>	<b>Administrasi Pembangunan</b>			
a.	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa			- Jumlah buku 4 = 100%
b.	Buku Kegiatan Pembangunan			- Jumlah buku 3 = 75%
c.	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan			- Jumlah buku 2 = 50%
d.	Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat			- Jumlah buku 1 = 25%
<b>JUMLAH</b>				
<b>5.</b>	<b>Administrasi Lainnya</b>			
a.	Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa			- Jumlah buku 3 = 100%
b.	Buku Musyawarah Desa			- Jumlah buku 2 = 70%
c.	Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat			- Jumlah buku 1 = 40%
<b>JUMLAH</b>				
<b>TOTAL</b>				

**Cara Pengisian:**

- berilah tanda (✓) pada kolom 3 dan 4 dengan ketentuan: Dokumen dikatakan "**ada**" apabila buku tersedia dan sudah terisi lengkap. Jika tidak memenuhi salah satu atau salah keduanya maka dikatakan "**tidak ada**".
- Jumlah persentase untuk masing-masing administrasi diisi berdasarkan ketentuan pada kolom 5.
- Total persentase tertib administrasi desa masing-masing desa dihitung dengan rumus [ **jumlah persentase semua administrasi / jumlah jenis buku administrasi** ]
- Data persentase tertib administrasi masing-masing desa di rekap sesuai tabel berikut.

<b>Rekap Penilaian Tertib Administrasi Desa (Persen)</b>							
<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Adm Umum</b>	<b>Adm Penduduk</b>	<b>Adm Keuangan</b>	<b>Adm Pembangunan</b>	<b>Adm Lainnya</b>	<b>Rata-rata</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Srengseng						
2	Rajegwesi						
3	Sidamulya						
4	Mulyoharjo						
5	Semboja						
6	Jatiwangi						
7	Randusari						
8	Pagerbarang						
9	Karanganyar						
10	Kertaharja						
11	Kedungsugih						
12	Surokidul						
13	Pesarean						
<b>Persentase Tertib Administrasi Desa Kecamatan</b>							

**Keterangan:**

- Persentase tertib administrasi untuk masing-masing jenis administrasi dari masing-masing desa dimasukkan ke dalam rekap.
- Persentase tertib administrasi masing-masing desa dihitung dengan rumus [ **jumlah persentase semua administrasi / jumlah jenis buku administrasi** ]
- Persentase tertib administrasi desa tingkat kecamatan dihitung dengan rumus [ **jumlah persentase semua desa / jumlah desa** ]

Rekap Penilaian Tertib Administrasi Desa (Jumlah)							
No	Desa	Adm Umum	Adm Penduduk	Adm Keuangan	Adm Pembangunan	Adm Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Srengseng						
2	Rajegwesi						
3	Sidamulya						
4	Mulyoharjo						
5	Semboja						
6	Jatiwangi						
7	Randusari						
8	Pagerbarang						
9	Karanganyar						
10	Kertaharja						
11	Kedungsugih						
12	Surokidul						
13	Pesarean						
<b>Jumlah Dokumen</b>							

**Keterangan:**

Jumlah buku untuk masing masing jenis administrasi menurut desa dimasukkan dala rekap.

### **Indikator Persentase Layanan Administrasi masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu**

PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT TERSELESAIKAN TEPAT WAKTU KECAMATAN PAGERBARANG KAB. TEGAL TAHUN .....				
No	Jenis Layanan	Jumlah Layanan yang Diajukan	Jumlah Layanan Terselesaikan Tepat Waktu	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 3 / 4 * 100
1	Ekonomi			
2	Catatan Sipil			
3	Kesejahteraan Masyarakat			
	<b>Rata-rata Persentase</b>			

#### **Keterangan:**

- e. Jenis layanan administrasi masyarakat dibagi dalam 3 kategori dengan rincian:
- Layanan ekonomi : Surat Pengantar Subsidi
  - Layanan Sipil : Waris, Dispensasi Nikah, Domisili
  - Layanan Kesra : SKTM, Proposal, Kebencanaan
- f. Rata-rata waktu penyelesaian 1 hari = 100 persen
- g. Kolom 3 diisi dengan jumlah layanan yang diajukan oleh masyarakat
- h. Kolom 4 diisi dengan jumlah layanan masyarakat yang terselesaikan tepat waktu
- i. Kolom 5 diisi dengan rumus [ **(jumlah layanan yang diajukan / jumlah layanan terselesaikan tepat waktu) x 100% ]**
- j. Rata-rata persentase dihitung dengan rumus [ **jumlah persentase layanan terselesaikan / jumlah layanan ]**

### Indikator Persentase LKD Aktif

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA KECAMATAN PAGERBARANG KAB. TEGAL TAHUN .....			
DASAR: PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018			
DESA : .....			
No	Jenis LKD	Persentase Keaktifan	Keterangan
1.	Rukun Tetangga	50	LKD dikatakan aktif bila memenuhi persyaratan: 1. Ada Kepengurusan (Bobot 50%) <b>dibuktikan adanya SK</b> 2. Kegiatan dilaksanakan sedikitnya dua kali (Bobot 50%) <b>dibuktikan dengan Laporan Kegiatan</b>
2.	Rukun Warga	50	
3.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	100	
4.	Karang Taruna	100	
5.	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	100	
6.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	50	
<b>Nilai Rata-Rata</b>		<b>75</b>	<b>→ Jumlah persentase keaktifan / 6</b>

Data persentase keaktifan LKD dari masing-masing desa kemudian direkap dalam tabel.

REKAP LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL TAHUN .....								
(Dalam Persen)								
No	Desa	RT	RW	PKK	Karang Taruna	Posyandu	LPM	Rata-rata
1	Srengseng							
2	Rajegwesi							
3	Sidamulya							
4	Mulyoharjo							
5	Semboja							
6	Jatiwangi							
7	Randusari							
8	Pagerbarang							
9	Karanganyar							
10	Kertaharja							
11	Kedungsugih							
12	Surokidul							
13	Pesarean							
Rata-rata								

Rata-rata persentase keaktifan LKD dihitung dengan rumus **(jumlah persentase keaktifan / jumlah desa)**

REKAP LKD AKTIF  
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL  
TAHUN .....  
(Dalam Jumlah)

No	Desa	Jumlah LKD Aktif
1	Srengseng	
2	Rajegwesi	
3	Sidamulya	
4	Mulyoharjo	
5	Semboja	
6	Jatiwangi	
7	Randusari	
8	Pagerbarang	
9	Karanganyar	
10	Kertaharja	
11	Kedungsugih	
12	Surokidul	
13	Pesarean	
Jumlah LKD Aktif		

**Indikator Persentase Ganguan Trantibum yang Ditindaklanjuti**

GANGGUAN TRANTIBUM YANG DITINDAKLANJUTI KECAMATAN PAGERBARANG KAB. TEGAL TAHUN .....				
No	Desa	Jumlah Laporan Gangguan Trantibum Dilaporkan	Jumlah Gangguan Trantibum Diselesaikan	Persentase Gangguan Trantibum yang Diselesaikan Kec. Pagerbarang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 3 / 4 * 100
1	Srengseng			
2	Rajegwesi			
3	Sidamulya			
4	Mulyoharjo			
5	Semboja			
6	Jatiwangi			
7	Randusari			
8	Pagerbarang			
9	Karanganyar			
10	Kertaharja			
11	Kedungsugih			
12	Surokidul			
13	Pesarean			
<b>Rata-rata</b>				

**Keterangan:**

- k. Kolom 3 diisi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan
- l. Kolom 4 diisi jumlah gangguan trantibum yang telah diselesaikan
- m. Kolom 5 dihitung dengan rumus [ **(kolom 3 / kolom 4 x 100%)** ]
- n. Rata-rata dihitung dengan rumus [ **jumlah persentase gangguan trantibun yang diselesaikan / jumlah desa** ]

**Indikator Penyelenggaraan Fasilitas, Koordinasi, dan Pembinaan**

PENYELENGGARAAN FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN KECAMATAN PAGERBARANG KAB. TEGAL TAHUN .....				
No	Unit Kerja	Jumlah Fasilitas, Rakor dan Pembinaan Direncanakan	Jumlah Fasilitas, Rakor dan Pembinaan Dilaksanakan	Persentase Terselenggaranya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kec. Pagerbarang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 3 / 4 * 100
1	Kecamatan Pagerbarang			

**Keterangan:**

- o. Kolom 3 diisi jumlah kegiatan rakor dan pembinaan yang direncanakan.
- p. Kolom 4 diisi jumlah kegiatan rakor dan pembinaan yang telah dilaksanakan.
- q. Kolom 5 diisi dengan rumus [ **(kolom 4 / kolom 3) x 100%** ]

### Indikator Persentase Desa dengan LPPD Tepat Waktu

PERSENTASE LPPD TERSUSUN TEPAT WAKTU KECAMATAN PAGERBARANG KAB. TEGAL TAHUN .....			
No	Desa	Tanggal Penyampaian LPPD	Persentase LPPD disusun tepat waktu
1	Srengseng		
2	Rajegwesi		
3	Sidamulya		
4	Mulyoharjo		
5	Semboja		
6	Jatiwangi		
7	Randusari		
8	Pagerbarang		
9	Karanganyar		
10	Kertaharja		
11	Kedungsugih		
12	Surokidul		
13	Pesarean		
<b>Rata-Rata Persentase</b>			

#### Keterangan:

- r. Persentase ketepatan waktu penyusunan LPPD dihitung berdasarkan waktu pengumpulan dokumen melalui Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan, dengan kriteria:
- Pengumpulan s.d 31 Maret = 100 Persen
  - Pengumpulan 1 April s.d 30 April = 75 Persen
  - Pengumpulan Mei s.d Desember = 50 Persen
- s. Rata-rata persentase dihitung dengan rumus (**Jumlah persentase penyampaian LPPD seluruh desa / jumlah seluruh desa**)

Lampiran 2 Metadata Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		IKM Kecamatan Pagerbarang	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai Ikm)	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai Ikm)	Nilai; Tahunan	Nilai IKM Tahun (N)	Jika Nilai IKM Meningkat Positif, Berarti Ada Perbaikan Dalam Kualitas Layanan Yang Dilakukan Masyarakat, Ataupun Sebaliknya	Aplksi Sepakat
1.1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan		Persentase Tertib Administrasi Desa Kecamatan Pagerbarang	Jumlah Desa Yang Difasilitasi/Dibina Tertib Administrasi	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pagerbarang	Persentase Rata-Rata Keseluruhan Administrasi Di Desa/Jumlah Desa	Persen; Tahunan	Nilai Rata-Rata Keseluruhan Administrasi Di Desa/Jumlah Desa	Komitmen Dan Ketertiban Desa Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Laporan Kasi Pemdes
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Yang Telah Memenuhi Standar Pelayanan (Unit Layanan)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan Administrasi Masyarakat	Persen; Tahunan	Jumlah Layanan Terselesaikan Tepat Waktu/Jumlah Layanan Yang Diajukan Dikali 100%	Kinerja Operasional Meningkat, Karena Pelayanan Diberikan Sesuai Prosedur Dan Tanpa Penundaan. Dengan Kata Lain, Output Menandakan Produktivitas Dan Disiplin Pelayanan.	Sepakat
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Yang Disusun (Dokumen)	Meningkatnya Sinergi Antar Perangkat Daerah Dan Instansi Terkait Di Tingkat Kecamatan	Kerja Sama Yang Erat Dan Efektif Antara Dinas-Dinas Sipil Di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Dilaksanakan Dibagi Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Direncanakan Dikali 100%	Mengukur Se jauh Mana Kegiatan Layanan Publik Yang Dilakukan Oleh Suatu Instansi Atau Unit Kerja Telah Dikoordinasikan Dengan Pihak-Pihak Terkait	Laporan Kasi Pelayanan Publik
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Yang Disusun (Dokumen)	Meningkatnya Efisiensi Dan/Atau Kualitas Hasil Dari Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Upaya Sistematis Untuk Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Agar Lebih Efisien, Tepat Sasaran Dan Berdampak Nyata Bagi Masyarakat, Melalui Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Serta Evaluasi Kegiatan Pemerintahan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Perencanaan Yang Telah Disusun Dan Disahkan Dalam Periode Tertentu (Bulanan, Triwulanan, Atau Tahunan)	Mengukur Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan Untuk Meningkatkan Efektivitas Dalam Kegiatan Perencanaan Di Tingkat Kecamatan	Laporan Kasi Pelayanan Publik

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Yang Telah Diselesaikan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Ukuran Yang Menunjukkan Tingkat Realisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Dibandingkan Dengan Rencana Atau Target Yang Telah Ditetapkan	Kegiatan	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana Dibagi Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Dikali 100%	Mengukur Se jauh Mana Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana Dibandingkan Dengan Target Atau Rencana Yang Telah Ditetapkan	Laporan Kasi Pelayanan Publik
		Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Dokumen Laporan Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kepatuhan Dan Capaian Indikator SPM	Proses Penyelenggaraan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan Dalam Rangka Meningkatkan Peran Camat Di Daerah Rawan Bencana Dalam Mendukung Upaya Penanggulangan Bencana	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Telah Disusun Dan Disahkan Dalam Periode Tertentu (Bulanan, Triwulanan, Atau Tahunan)	Mengukur Seberapa Banyak Laporan Yang Telah Disusun Dan Disampaikan Terkait Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Laporan Kasi Pelayanan Publik
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Telah Diselesaikan	Meningkatnya Efisiensi Dan Kualitas Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan	Proses Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Yang Diberikan Oleh Bupati/Wali Kota Kepada Camat Untuk Menjalankan Tugas-Tugas Pemerintahan Tertentu Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Dan Terlaksana Dibagi Jumlah Total Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Dikali 100%	Mengukur Se jauh Mana Urusan Pemerintahan Yang Telah Didelegasikan Kepada Camat Benar-Benar Dijalankan Sesuai Dengan Ketentuan	Laporan Kasi Pelayanan Publik

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Yang Disusun	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Proses Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Pemerintah Pusat Atau Daerah Kepada Perangkat Daerah, Camat, Atau Pihak Lain Yang Berwenang, Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Layanan Publik Dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Wilayah Tertentu	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Yang Telah Disusun Dan Disahkan Dalam Periode Tertentu (Bulanan, Triwulanan, Atau Tahunan)	Mengukur Seberapa Banyak Laporan Yang Telah Disusun Dan Disampaikan Terkait Pelaksanaan Kewenangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Camat	Laporan Kasi Pelayanan Publik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	Jumlah Fasilitasi/Pembinaan LKD Yang Dilaksanakan (Kegiatan)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Yang Aktif	Persen; Tahunan	Nilai Rata-Rata Persentase Keaktifan Seluruh Desa Di Kecamatan	Partisipasi LKD Yang Aktif Mengindikasikan Keberhasilan Program Pemberdayaan Desa, Peningkatan Infrastruktur Serta Peningkatan Kapasitas Ekonomi Dan Sosial Desa, Begitupun Sebaliknya	IDM
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah LKD Aktif	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Sinergi Dan Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa	Banyaknya kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Data Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Tersedia	Semakin Tinggi Jumlah LKD Aktif, Menunjukkan Semakin Baik Tingkat Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat, Serta Semakin Efektif Pembinaan Kelembagaan Sosial Oleh Pemerintah Kecamatan/Desa.	Laporan Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Partisipasi Musrenbang Desa	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Organisasi/ Kelompok Masyarakat Di Tingkat Desa Yang Turut Serta Secara Aktif Dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Atau Kelompok Masyarakat Di Tingkat Desa Yang Turut Serta Secara Aktif Dalam Proses Musrenbang Kecamatan	Mengukur Tingkat Partisipasi Organisasi Atau Kelompok Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Tingkat Desa	Laporan Kasi Pemberdayaan Masyarakat

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
		Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ygdilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Diakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kecamatan Pagerbarang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Disusun (Dokumen)	Meningkatnya Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Yang Memuat Kesepakatan, Koordinasi Atau Integrasi Antara Program Kerja Serta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Dan Pihak Swasta Dalam Satu Wilayah Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Yang Telah Disusun Atau Disinkronkan Dalam Periode Tertentu	Mengukur Jumlah Dokumen Yang Dihilangkan Sebagai Bukti Adanya Sinkronisasi Antara Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Dan Pihak Swasta Di Tingkat Kecamatan	Laporan Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Disusun (Dokumen)	Meningkatnya Efektivitas Dan Keberhasilan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Yang Disusun Dan Disampaikan Oleh Pihak Terkait Mengenai Upaya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Suatu Kecamatan Dalam Periode Tertentu	Dokumen	Jumlah Laporan Yang Disusun Dan Terdokumentasikan Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaporkan Dalam Suatu Kecamatan	Mengukur Jumlah Laporan Yang Dihilangkan Terkait Peningkatan Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	Laporan Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Ditindaklanjuti Kecamatan Pagerbarang	Jumlah Kasus/Laporan Gangguan Trantibum Yang Ditindaklanjuti Oleh Kecamatan	Meningkatnya Rasa Aman, Tertib, Dan Kondusifitas Wilayah Kecamatan Pagerbarang	Perbandingan Antara Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum) Yang Berhasil Ditindaklanjuti Oleh Kecamatan Dengan Total Jumlah Kasus Gangguan Trantibum Yang Dilaporkan Dalam Periode Tertentu	Persen; Tahunan	Jumlah Gangguan Trantibum Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Laporan Gangguan Trantibum Yang Dilaporkan Dikali 100%	Mengukur Efektivitas Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum) Di Wilayahnya	Laporan Kasi Pemerintahan, Trantibum
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Penyelenggaraan LINMAS	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Penanggulangan Bencana (Desa)	Meningkatnya Kesiapsiagaan, Ketanggapan, Dan Kapasitas Desa Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Desa Yang Telah Difasilitasi Penyelenggaraan Linmas Dalam Bentuk Program, Pelatihan, Peralatan Atau Pendampingan Dari Kecamatan	Desa	Jumlah Desa Yang Menerima Fasilitas Penyelenggaraan Linmas	Mengukur Jumlah Desa Yang Menerima Dukungan Dalam Bentuk Fasilitas Terkait Penyelenggaraan Linmas	Laporan Kasi Pemerintahan, Trantibum
		Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Yang Disusun (Laporan)	Meningkatnya Sinergi Dan Kolaborasi Antar Instansi Dalam Menjaga Trantibum	Jumlah Dokumen Atau Laporan Tertulis Yang Mencatat Hasil Koordinasi, Kerja Sama Atau Kegiatan Bersama Antara Pemerintah Kecamatan Dengan	Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Dan Sinergitas Yang Telah Disusun Dan Disampaikan	Mengukur Kuantitas Laporan Yang Dihilangkan Dari Koordinasi Dan Kerja Sama Antara Pemerintah Kecamatan Dengan Polri,	Laporan Kasi Pemerintahan, Trantibum

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
		Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan			Kepolisian, TNI Dan Instansi Vertikal Lainnya Dalam Menjalankan Tugas			TNI Dan Instansi Vertikal Lainnya	
		Kegiatan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terlaksana	Terlaksananya Sejumlah Kegiatan Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Adalah Banyaknya Laporan Hasil Koordinasi Atau Sinergi Yang Dilakukan Dengan Perangkat Daerah Yang Memiliki Tugas Dan Fungsi Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Kurun Waktu Tertentu	Kegiatan	Jumlah Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan	Mengukur Aktivitas Koordinasi Yang Dilakukan Oleh Suatu Instansi Atau Lembaga Dalam Rangka Memastikan Implementasi Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Kasi Pemerintahan, Trantibum
		Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi Yang Disusun	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Yang Dilakukan Dengan Perangkat Daerah Yang Memiliki Tugas Dan Fungsi Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Tertentu	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Didokumentasikan Dalam Periode Tertentu	Mengukur Sejahtera Mana Suatu Instansi Melakukan Koordinasi Atau Sinergi Dengan Pihak Terkait Dalam Rangka Penegakan Hukum Dan Regulasi	Laporan Kasi Pemerintahan, Trantibum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Dan Pembinaan Yang Dilaksanakan (Kegiatan)	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Kecamatan	Ukuran Yang Menunjukkan Proporsi Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Dan Pembinaan Yang Telah Dilaksanakan Dibandingkan Dengan Jumlah Kegiatan Yang Direncanakan Dalam Satu Periode Tertentu.	Persen; Tahunan	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dibagi Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Yang	Mengukur Sejahtera Mana Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Dan Pembinaan Bagi Kecamatan Telah Terlaksana Sesuai Dengan Target Yang Ditetapkan	Laporan Kasi Pemerintahan, Trantibum

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
			Kecamatan Pagerbarang					Direncanakan Dikali 100%		
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana (Kegiatan)	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Oleh Kepala Daerah	Ukuran Yang Menunjukkan Tingkat Realisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan	Mengukur Se jauh Mana Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Oleh Kepala Daerah Sebagaimana Ditunjukkan Oleh Pelaksanaan Yang Optimal	Laporan Kasi Pemerintahan, Trantibum
		Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dlm Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD N Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kedaulatan	Jumlah Orang/Peserta Yang Hadir Dan Mengikuti Pembinaan	Meningkatnya Pemahaman Dan Komitmen Peserta Terhadap Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Jumlah Individu Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Pembinaan Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Guna Memperkuat Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI Dalam Kurun Waktu Tertentu	Orang	Jumlah Orang Atau Peserta Yang Hadir Atau Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Mengukur Jumlah Individu Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Pembinaan Yang Bertujuan Meningkatkan Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Laporan Kasi Pemerintahan, Trantibum

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
			Republik Indonesia							
		Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang/Peserta Yang Hadir Dan Mengikuti Pembinaan Setelah Mengikuti Kegiatan Pembinaan	Meningkatnya Pemahaman Dan Komitmen Peserta Dalam Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Individu Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Pembinaan Yang Bertujuan Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Periode Tertentu, Baik Melalui Sosialisasi, Pelatihan, Seminar, Atau Program Lainnya Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Terkait	Orang	Jumlah Peserta Yang Hadir Dan Mengikuti Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Mengukur Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Yang Bertujuan Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Laporan Kasi Pemerintahan, Trantibum
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Keputusan/Rekomendasi/Notulen Rapat Forkopimcam Yang Disahkan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Secara Efektif	Jumlah Keseluruhan Dokumen Yang Berisi Tugas, Keputusan Atau Hasil Koordinasi Yang Dibuat Oleh Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan (Forkopimcam) Dalam Periode Tertentu	Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam Yang Telah Dibuat Dan Ditetapkan Dalam Periode Tertentu	Ukuran Kuantitatif Untuk Menilai Keberadaan, Pelaksanaan, Atau Efektivitas Tugas Yang Dilakukan Oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)	Laporan Kasi Pemerintahan, Trantibum
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tepat Waktu	Jumlah Desa Yang Menyampaikan LPPD Tepat Waktu	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Pagerbarang	Persentase Desa Yang Menyusun LPPD Secara Tepat Waktu	Persen; Tahunan	Jumlah Desa Yang Menyusun LPPD Tepat Waktu Dibagi Jumlah Seluruh Desa	Komitmen Dan Ketertiban Desa Dalam Penyusunan LPPD	Laporan Kasi Pemdes
		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Tertib Administrasi Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi/Rekomendasi/Laporan Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Telah Memenuhi Standar Pencatatan, Pengelolaan Dan Pelaporan Data Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	Dokumen	Jumlah Dokumen Yang Memenuhi Kriteria Tertib Administrasi Desa Dikali Jumlah Desa	Mengukur Jumlah Dokumen Yang Telah Memenuhi Standar Administrasi Pemerintahan Sesuai Dengan Regulasi Yang Berlaku	Laporan Kasi Pemdes

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
		Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Adminitrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa Adalah Jumlah Keseluruhan Dokumen Rancangan Peraturan Desa Dan/Atau Peraturan Kepala Desa Yang Telah Mendapatkan Pendampingan, Asistensi, Atau Evaluasi Oleh Pihak Yang Berwenang Dalam Suatu Periode Tertentu	Dokumen	Jumlah Dokumen Yang Berhasil Difasilitasi Dalam Suatu Periode Tertentu	Mengukur Jumlah Dokumen Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa Yang Telah Difasilitasi Oleh Instansi Atau Pihak Yang Bertanggung Jawab, Seperti Pemerintah Daerah Atau Kementerian Terkait	Laporan Kasi Pemdes
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa Yang Difasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Telah Diberikan Pendampingan, Bimbingan Atau Asistensi Oleh Pihak Yang Berwenang Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Serta Pertanggungjawaban Keuangan Desa Dan Pengelolaan Aset Desa Dalam Suatu Periode Tertentu	Dokumen	Jumlah Dokumen Yang Diberikan Pendampingan, Asistensi, Atau Persetujuan Dlm Pengelolaan Keuangan Desa & Pendayagunaan Aset Desa Telah Difasilitasi Dalam Periode Tertentu	Mengukur Seberapa Banyak Dokumen Yang Telah Mendapatkan Fasilitasi, Yang Mencerminkan Tingkat Keterlibatan Dan Dukungan Pemerintah Dalam Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Dan Aset Desa	Laporan Kasi Pemdes
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Yang Disusun, Diterbitkan Atau Difasilitasi Oleh Instansi Terkait Guna Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Serta Perangkat Desa. Dokumen Ini Dapat Mencakup Peraturan, Pedoman, Surat Keputusan, Dan Dokumen Lain Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen Fasilitasi Ini Dapat Berupa Surat Edaran, Pedoman Teknis, Modul Pelatihan, Regulasi, Atau Bentuk Lainnya Yang Mendukung Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Diterbitkan	Mencerminkan Tingkat Dukungan Dan Pembinaan Terhadap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Menjalankan Tugasnya Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	Laporan Kasi Pemdes

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Keseluruhan Dokumen Yang Disusun, Diterbitkan, Atau Digunakan Oleh Instansi Yang Berwenang Sebagai Bentuk Dukungan Administratif, Regulasi Dan Teknis Untuk Memastikan Kelancaran Proses Pemilihan Kepala Desa Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Dokumen	Jumlah Dokumen Yang Telah Disusun, Diterbitkan Atau Difasilitasi Dalam Periode Tertentu	Mengukur Se jauh Mana Pemerintah Atau Lembaga Terkait Memberikan Dukungan Dalam Bentuk Penyediaan Dokumen Yang Dibutuhkan Untuk Pilkades	Laporan Kasi Pemdes
		Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dg Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Yang Difasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Yang Menunjukkan Keselarasan Antara Perencanaan Pembangunan Daerah (Seperti RPJMD Atau RKPD) Dengan Perencanaan Pembangunan Desa (Seperti Rpjmdes Atau Rkpdes) Dalam Suatu Periode Tertentu	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Telah Memiliki Bukti Sinkronisasi	Mengukur Seberapa Banyak Dokumen Yang Disusun Atau Difasilitasi Dalam Rangka Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Laporan Kasi Pemdes
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpenuhi	Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	Capaian output kegiatan kesekretariatan yang terlaksana	Persen; Tahunan	Jumlah Layanan Penunjang Yang Terpenuhi Dibagi Jumlah Layanan Penunjang Yang Ditetapkan Dikali 100%	Mengukur Se jauh Mana Layanan Penunjang Yang Diperlukan Oleh Perangkat Daerah Telah Terpenuhi Dalam Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Laporan Sekcam
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan Yang Akurat Dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan Yang Telah Disusun Dan Diselesaikan Sesuai Dengan Jadwal Atau Tenggat Waktu Yang Telah Ditetapkan Dalam Peraturan Atau Pedoman Yang Berlaku	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan Disusun Tepat Waktu	Semua Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan Disusun Tepat Waktu, Menunjukkan Disiplin Dan Kepatuhan Tinggi Terhadap Regulasi	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Resmi Yang Disusun Oleh Perangkat Daerah Sebagai Acuan Dalam Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran, Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Adalah Jumlah Dokumen Resmi Yang Disusun Tepat Waktu	Ukuran Kuantitatif Yang Menunjukkan Banyaknya Dokumen Perencanaan Yang Telah Disusun Oleh Perangkat Daerah Dalam Suatu Periode Tertentu	Laporan Sekcam

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Yang Disusun Oleh SKPD Yang Memuat Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Yang Ditetapkan Serta Ikhtisar Realisasi Anggaran Dan Output Yang Telah Dicapai Dalam Periode Tertentu	Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Yang Telah Disusun Dan Disampaikan	Mengukur Jumlah Dokumen Yang Berhasil Disusun Terkait Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD)	Laporan Sekcam
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Disusun Tertib Administrasi Dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akurat Dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan Ketentuan Administrasi Yang Berlaku Dan Diselesaikan Dalam Batas Waktu Yang Telah Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Disusun Tertib Administrasi Dan Tepat Waktu	Mengukur Jumlah Dokumen Terkait Pengelolaan Keuangan Yang Disusun Tertib Administrasi Dan Tepat Waktu	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Mendapatkan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Dalam Periode Tertentu Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Orang/ Bulan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Mengukur Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Dalam Suatu Periode Tertentu (Bulanan, Triwulanan, Tahunan)	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Yang Diselesaikan	Terlaksananya Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Secara Tertib Dan Akuntabel	Jumlah Dokumen Yang Diproses Dalam Rangka Pencatatan, Pengelolaan, Serta Verifikasi Keuangan Pada Suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Periode Tertentu	Dokumen	Jumlah Dokumen Yang Diproses Dalam Rangka Pencatatan, Pengelolaan Serta Verifikasi Keuangan Pada Suatu SKPD Dalam Periode Tertentu	Mengukur Jumlah Dokumen Yang Berkaitan Dengan Proses Administrasi Keuangan Dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Laporan Sekcam
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Layanan Kepegawaian Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Layanan Kepegawaian Yang Diselesaikan/Diproses	Terpenuhinya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Layanan Kepegawaian Sesuai Ketentuan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Layanan Kepegawaian Sesuai Ketentuan Dalam Periode Tertentu	Mengukur Jumlah Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian Pada Suatu Perangkat Daerah	Laporan Sekcam

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
					Sesuai Ketentuan/Target					
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Disediakan	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Dalam Suatu Periode Tertentu	Mengukur Jumlah Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Telah Disediakan Dalam Suatu Periode Tertentu	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Sesuai Tugas Dan Fungsi	Meningkatnya Kompetensi/Kualitas SDM ASN Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Mengukur Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Laporan Sekcam
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pemenuhan Administrasi Umum Yang Disediakan	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Yang Disediakan/Terlaksana	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan/Target	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedia	Paket	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Mengukur Se jauh Mana Perangkat Daerah Memenuhi Persyaratan Administrasi Umum Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor Yagn Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banyaknya Unit Atau Set Peralatan Listrik & Penerangan Yang Telah Disiapkan Untuk Digunakan Dalam Operasional Atau Pemeliharaan Bangunan Kantor	Paket	Jumlah Unit Atau Set Peralatan Listrik Dan Penerangan Yang Telah Dibelanjakan	Mengukur Jumlah Paket Komponen Yang Berkaitan Dengan Instalasi Listrik Dan Sistem Penerangan Di Suatu Bangunan Kantor Yang Telah Disediakan	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Keseluruhan Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Telah Disiapkan Dan Tersedia Untuk Digunakan Dalam Mendukung Operasional Organisasi Dalam Suatu Periode Tertentu	Paket	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Telah Disediakan Dalam Suatu Periode Tertentu	Mengukur Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Telah Disediakan Dalam Suatu Periode Tertentu, Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Telah Disiapkan Dan Didistribusikan Oleh Instansi Atau Pihak Yang Berwenang Dalam Periode Tertentu, Sesuai Dengan	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan Dalam Suatu Periode Tertentu	Mengukur Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Telah Disediakan Oleh Instansi Atau Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Periode Tertentu	Laporan Sekcam

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
						Standar Dan Kebutuhan Yang Ditetapkan				
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Berisi Bahan Logistik Kantor Yang Telah Disiapkan Dan Tersedia Untuk Digunakan Dalam Mendukung Operasional Kantor Dalam Periode Tertentu	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Dalam Suatu Periode Tertentu	Mengukur Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Telah Disediakan Dalam Suatu Periode Tertentu, Baik Secara Bulanan, Triwulanan Maupun Tahunan	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan" Adalah Total Unit Atau Paket Barang Cetakan Dan Hasil Penggandaan Yang Telah Diproduksi Dan Disediakan Dalam Suatu Periode Tertentu	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Telah Disediakan Dalam Suatu Periode Tertentu	Mengukur Ketersediaan Dan Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan Serta Penggandaan Dalam Organisasi Atau Instansi	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Yang Telah Tersedia Untuk Suatu Periode Tertentu	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Berupa Bahan Bacaan Dan Regulasi Yang Tersedia Bagi Pengguna Dalam Suatu Periode Tertentu, Baik Dalam Bentuk Cetak Maupun Digital, Yang Dapat Diakses Untuk Keperluan Edukasi, Sosialisasi, Atau Referensi Kebijakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Yang Telah Tersedia Untuk Suatu Periode Tertentu	Mengukur Jumlah Dokumen Yang Disediakan Oleh Suatu Instansi Atau Unit Kerja	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan n Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Yang Dihilangkan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Secara Efektif	Jumlah Dokumen Laporan Yang Dibuat Dan Disahkan Sebagai Hasil Dari Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Periode Tertentu	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Perjalanan Dinas Yang Telah Dilaksanakan	Mengukur Jumlah Laporan Yang Dihilangkan Terkait Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Laporan Sekcam
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah (BMD) Yang Disediakan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Yang Dipenuhi Sesuai Dengan Kebutuhan	Mengukur Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) Yang Dibutuhkan	Laporan Sekcam

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Jabaran Yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Yang Dialokasikan Oleh Instansi Pemerintah Untuk Digunakan Oleh Pejabat Atau Pegawai Dalam Menjalankan Tugas Kedinasan, Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Jabaran Yang Disediakan	Mengukur Jumlah Kendaraan Dinas Yang Tersedia Bagi Pegawai Atau Pejabat Dalam Suatu Instansi Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Mereka	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Banyaknya Kendaraan Yang Dialokasikan Dan Tersedia Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Operasional Atau Kegiatan Di Lapangan Dalam Suatu Periode Tertentu	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Mengukur Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Tersedia Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Instansi	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Keseluruhan Unit Peralatan Dan Mesin Yang Telah Disiapkan Dan Tersedia Untuk Digunakan Sesuai Dengan Tujuan Atau Kebutuhan Tertentu Dalam Suatu Periode Tertentu	Unit	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Mengukur Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Yang Berhasil Disediakan Dalam Suatu Periode Tertentu, Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Atau Unit Kerja Yang Bersangkutan	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang Disediakan	Jumlah Unit Mebel Yang Disediakan	Tersedianya Mebel	Jumlah Keseluruhan Paket Mebel Yang Telah Tersedia Dan Siap Digunakan Dalam Suatu Periode Tertentu, Sesuai Dengan Spesifikasi Dan Standar Yang Ditetapkan	Unit	Jumlah Unit Mebel Yang Disediakan	Mengukur Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Telah Disediakan Dalam Suatu Periode Tertentu, Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Atau Pengguna Yang Dituju	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Tersedianya Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Fisik Gedung Atau Bangunan Yang Telah Dibangun, Direnovasi, Atau Dialokasikan Untuk Mendukung Operasional Suatu Instansi Atau Keperluan Layanan Publik Dalam Periode Tertentu	Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Mengukur Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Telah Disediakan Dalam Suatu Periode Tertentu Sesuai Dengan Perencanaan Dan Kebutuhan Organisasi	Laporan Sekcam

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
		Sub Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Yang Disediakan	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Fisik Unit Gedung Atau Bangunan Lain Yang Telah Tersedia Dan Dapat Digunakan Untuk Mendukung Operasional Suatu Instansi Atau Organisasi Dalam Periode Tertentu	Unit	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Yang Disediakan	Mengukur Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Berupa Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Berhasil Disediakan Dalam Suatu Periode Waktu Tertentu	Laporan Sekcam
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan Dan Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia	Paket	Jumlah Paket Kegiatan Penyediaan Jasa Yang Terlaksana	Mengukur Se jauh Mana Pemerintahan Daerah Dapat Menjalankan Fungsi Dan Tugasnya Tanpa Hambatan Yang Signifikan	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Yang Dihasilkan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Secara Efektif	Jumlah Dokumen Atau Laporan Yang Mencatat Aktivitas Penyediaan Layanan Surat-Menyurat Dalam Suatu Periode Tertentu	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Pos Yang Disediakan	Mengukur Jumlah Laporan Yang Disusun Dan Disampaikan Terkait Dengan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Dalam Suatu Instansi Atau Organisasi	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dihasilkan	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Mendukung Operasional Kantor	Jumlah Dokumen Atau Laporan Resmi Yang Mencatat Penyediaan Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik Dalam Suatu Periode Tertentu	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Komunikasi, Air, Listrik Yang Telah Disediakan	Mengukur Jumlah Laporan Yang Disusun Terkait Penyediaan Layanan Utama Yang Mendukung Operasional Organisasi	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dihasilkan	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Mendukung Operasional Kantor	Jumlah Laporan Yang Mendokumentasikan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Di Kantor Dalam Periode Tertentu	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa THL Yang Telah Disediakan	Mengukur Jumlah Laporan Yang Dibuat Terkait Dengan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Di Kantor	Laporan Sekcam
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Yang Selesai Dipelihara	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Yang Selesai Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah	Kondisi Baik Adalah Total Unit Atau Volume Aset Daerah Yang Secara Fisik Dan Fungsional Masih Layak Digunakan Sesuai Dengan Standar Yang Ditetapkan, Berdasarkan Hasil	Unit	Jumlah BMD Dalam Kondisi Baik	Mengukur Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Yang Masih Dalam Kondisi Layak Pakai Dan Berfungsi Sebagaimana Mestinya	Laporan Sekcam

No	Tujuan Dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Output	Outcome	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
						Pemeriksaan Atau Penilaian Berkala				
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jbaatan Yang Dipelihar Dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Selesai Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas Dan Terpenuhinya Kewajiban Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Dan Telah Dibayarkan Pajaknya Dalam Suatu Periode Tertentu	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Telah Dilakukan Pemeliharaan Dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kendaraan Dinas Dipelihara Dengan Baik Dan Pajaknya Dibayar Tepat Waktu, Menunjukkan Pengelolaan Aset Yang Optimal	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Selesai Dipelihara	Terpeliharanya Kondisi Peralatan Dan Mesin Yang Layak Operasional	Banyaknya Unit Peralatan Dan Mesin, Selain Yang Termasuk Dalam Kategori Utama Tertentu, Yang Telah Dilakukan Pemeliharaan Dalam Suatu Periode Tertentu Sesuai Dengan Standar Yang Ditetapkan	Unit	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Telah Dilakukan Pemeliharaan	Mengukur Jumlah Peralatan Dan Mesin Selain Kategori Utama Yang Telah Dipelihara Dalam Periode Tertentu	Laporan Sekcam
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Unit Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Selesai Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Layak Operasional	Jumlah Unit Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Telah Dilakukan Kegiatan Pemeliharaan Atau Rehabilitasi Dalam Satu Periode Tertentu, Sesuai Dengan Standar Dan Prosedur Yang Ditetapkan	Unit	Jumlah Unit Gedung Dan Bangunan Kantor Yang Telah Dilakukan Pemeliharaan	Menunjukkan Efektivitas Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi, Memastikan Aset Terjaga Dengan Baik	Laporan Sekcam

CASCADING KECAMATAN PAGERBARANG

<b>MISI 6</b>	<b>Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih, dan Efektif</b>					
<b>TUJUAN RPJMD</b>	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi					
<b>SASARAN RPJMD</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi/Indeks Pelayanan Publik					
<b>TUJUAN RENSTRA</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					
<b>SASARAN RENSTRA</b>	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Indikator : Persentase Tertib Administrasi Desa					
<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  Persentase IKM Kecamatan Pagerbarang	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif Kecamatan Pagerbarang	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti Kecamatan Pagerbarang	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  Persentase Rata-Rata Tertib Adminstrasi Desa Kecamatan Pagerbarang	
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik Terkoordinasikan	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  Ketersediaan Data Lembaga Kemasyarakatan Desa	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>  Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	<b>Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  Jumlah Dokumen Tertib Administrasi Desa	
<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan →Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b> Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terlaksanakan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa → Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan →Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan →Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wiayah Kecamatan <b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD N RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI →Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa →Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa SubKegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa &Pendayagunaan Aset Desa →Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam ranka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa →Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan	

Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan  
→ Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**

Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  
→ Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Diakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan Pagerbarang Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  
→Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

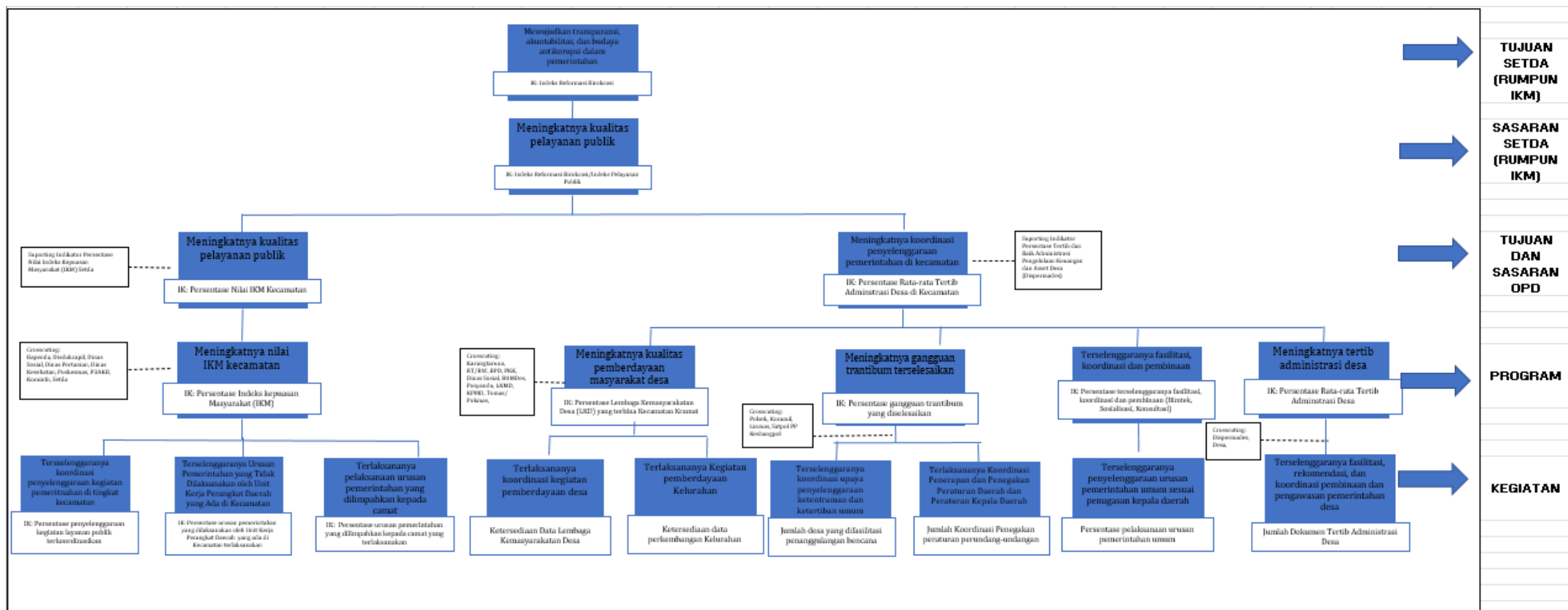
**Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan**

Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  
→Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

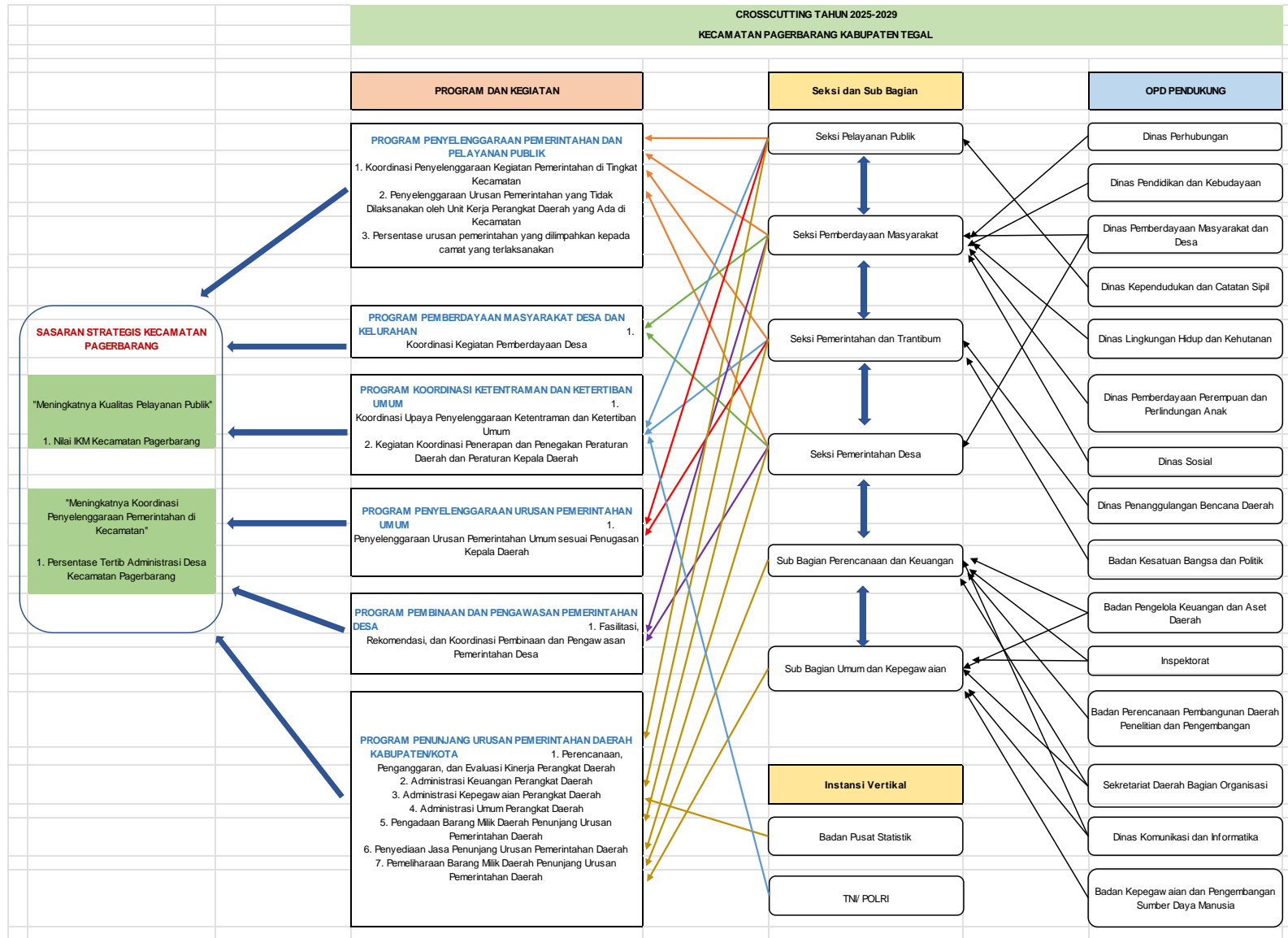
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI  
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  
→Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  
→Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Perangkat Desa  
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  
→Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  
→Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

## Lampiran 4 Pohon Kinerja



Lampiran 5 Crosscutting



# SPIP

RENCANA TINDAK  
PENGENDALIAN (RTP)



KECAMATAN PAGERBARANG  
TAHUN 2025